

**PENGARUH *ENTERPRISE RISK MANAGEMENT*, *INTELLECTUAL CAPITAL*, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN
(Studi pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur Tahun 2014-2018)**

DRAFT SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Sidang Skripsi

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh;

Yuliana Pratiwi

164020183



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2020**

**PENGARUH *ENTERPRISE RISK MANAGEMENT*, *INTELLECTUAL CAPITAL*, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN
(Studi pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur Tahun 2014-2018)**

DRAFT SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Sidang Skripsi

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan

Bandung, Juli 2020

Mengetahui,

Pembimbing

Ruslina Lisda, S.E., M.Si., Ak., C.A.

Ketua Program Studi

Isye Siti Aisyah, SE., Msi., Ak C.A.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang kinerja keuangan pada perusahaan BUMN sektor manufaktur periode tahun 2014-2018 dan untuk mengetahui pengaruh *enterprise risk management*, *intellectual capital*, *corporate social responsibility* dan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dalam penelitian ini dari 31 perusahaan BUMN Sektor Manufaktur, diambil 10 perusahaan dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan data laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2014-2018. Data penelitian diolah menggunakan software SPSS Versi 22 untuk menguji uji asumsi klasik, analisis regresi, analisis korelasi, uji hipotesis dan koefisien determinasi.

Secara parsial, *enterprise risk management*, *intellectual capital* dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Besarnya pengaruh *enterprise risk management* terhadap kinerja keuangan yaitu 16,2%. Besarnya pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan yaitu 15,1%. Besarnya pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan yaitu 9,8%. Sedangkan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena hanya memberikan kontribusi sebesar 3,1%. Secara simultan, *enterprise risk management*, *intellectual capital*, *corporate social responsibility* dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan, besarnya pengaruh *enterprise risk management*, *intellectual capital*, *corporate social responsibility* dan *good corporate governance* yaitu 44,3% dan sisanya, 55,7% merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis seperti *Return On Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM) atau Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Kata kunci: *Enterprise Risk Management*, *Intellectual Capital*, *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan.

ABSTRACT

This study aims to provide an overview of the financial performance of state-owned manufacturing companies in the 2014-2018 period and to determine the effect of enterprise risk management, intellectual capital, corporate social responsibility and good corporate governance on financial performance.

The research method used is descriptive and verification methods. In this study, out of the 31 companies registered with the Manufacturing Sector SOE, 10 were taken using Purposive Sampling. The type of data used in this study is secondary data using financial statement data and annual reports for the 2014-2018 period. The research data were processed using SPSS Version 22 software to test the classical assumption test, regression analysis, correlation analysis, hypothesis testing and coefficient of determination.

Partially, enterprise risk management, intellectual capital and good corporate governance affect financial performance, while corporate social responsibility does not affect financial performance. The magnitude of the effect of enterprise risk management on financial performance is 16.2%. The magnitude of the effect of intellectual capital on financial performance is 15.1%. The magnitude of the effect of good corporate governance on financial performance is 9.8%. While corporate social responsibility does not affect financial performance because it only contributes 3.1%. Simultaneously, enterprise risk management, intellectual capital, corporate social responsibility and good corporate governance affect financial performance, the magnitude of the effect of enterprise risk management, intellectual capital, corporate social responsibility and good corporate governance are 44.3% and the rest, 55.7% is the influence of other factors not examined by the author such as Return On Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM) or Operating Expenses on Operating Income (BOPO).

Keywords: Enterprise Risk Management, Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance and Financial Performance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan di Indonesia, terutama yang telah *go public* atau terdaftar di pasar modal wajib untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan tahunan. Laporan tahunan menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik (pemegang saham) atas sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya (SFAC no.1 paragraf 50). Lebih lanjut dinyatakan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan yang terdapat dalam SFAC No.1 paragraf 34 bahwa pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan yang serupa secara rasional. Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa informasi yang diberikan selain sebagai pertanggungjawaban manajemen, informasi harus dapat mendukung *stakeholder* dalam mengambil keputusan atau mengantisipasi keadaan ekonomi.

Korporasi atau perusahaan merupakan salah satu faktor yang memiliki peran sentral dalam perekonomian suatu Negara. Sebab, selain menjalankan fungsi-fungsi produksi dan distribusi barang dan jasa, korporasi juga terlibat langsung dalam proses alokasi sumber daya yang bersifat ekonomis bagi masyarakat. Peran ini sangat penting mengingat keberadaan sumber daya ekonomis yang sangat

terbatas dan oleh karenanya harus dapat dialokasikan seoptimal mungkin (Sabila, 2017).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah korporasi yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah. Oleh sebab itu, BUMN diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian Indonesia dan sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat serta diharapkan mampu memberikan kontribusi berharga bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, perdagangan serta konstruksi. BUMN dalam melaksanakan kegiatannya tercermin dalam salah satu alat ukur kinerja yaitu laporan keuangan yang menunjukkan kinerja finansial BUMN dalam setiap tahunnya.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Oleh karena itu para investor biasanya menggunakan informasi tersebut sebagai tolak ukur dalam melakukan transaksi jual beli saham suatu perusahaan. Jika kinerja keuangan menunjukkan prospek yang baik, maka saham tersebut akan diminati oleh para investor dan berpengaruh pada nilai jual

saham tersebut. Penilaian kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan. (Fahmi, 2012:2)

Kinerja keuangan merupakan patokan utama untuk mengukur baik atau tidaknya kinerja perusahaan, hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangannya. Mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat diketahui melalui dua sisi yaitu: sisi internal perusahaan dengan melihat laporan keuangan dan sisi eksternal perusahaan yaitu nilai perusahaan dengan cara menghitung kinerja keuangan perusahaan. Indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan adalah melalui rasio keuangan. Rasio yang umum menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Rasio yang sering digunakan adalah *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan secara menyeluruh. ROA dapat menunjukkan efisiensi dari asset yang digunakan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik pula kinerja perusahaan (Sabila, 2017).

Salah satu fenomena yang terjadi pada perusahaan BUMN sektor manufaktur yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk mengalami kerugian sepanjang tahun 2018, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) kembali mencatatkan kerugian senilai US\$ 74,82 juta atau setara Rp 1,05 triliun (kurs Rp 14.000/US\$). Ini berarti sudah sejak tahun 2012 perusahaan terus menerus menunjukkan rapor merah. Pada dasarnya meski merugi 7 tahun, sejatinya KRAS mencatatkan kenaikan pendapatan sejak tahun 2016, bahkan di tahun 2018, total pendapatan naik hingga 20,05% year-on-year (YoY) menjadi US\$ 1,74 miliar dari sebelumnya US\$ 1,45 miliar. Pertumbuhan tersebut merupakan prestasi yang cukup baik, karena di tahun 2017

dan 2016, total pendapatan KRAS hanya tumbuh masing-masing 7,76% YoY dan 1,73% YoY. Pertumbuhan pendapatan seiring dengan membaiknya harga baja dunia.

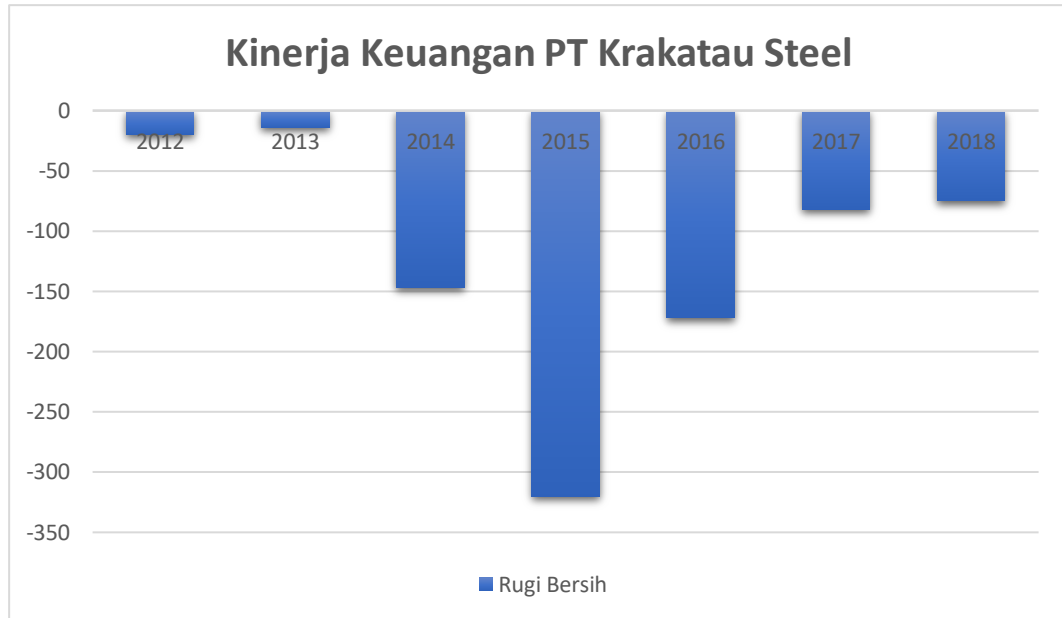
Pergerakan harga baja tipe 'Hot-Rolled Coil/HRC', dimana tipe baja menyumbang hampir 60% dari total baja yang dijual perusahaan, cenderung naik sejak 2016. Sehingga tentunya, perubahan harga baja HRC akan berpengaruh signifikan pada perolehan pendapatan KRAS. Berikut adalah daftar kinerja keuangan PT Krakatau Steel:

Tabel 1.1
Kinerja Keuangan PT.Krakatau Steel (Dalam Juta US\$)

Tahun	Rugi Bersih
2012	-20
2013	-14
2014	-147
2015	-320
2016	-172
2017	-82
2018	-75

Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190409130244-17-65433/7-tahun-merugi-krakatau-steel-merana-karena-utang>

Berikut adalah grafik kerugian PT Krakatau Steel (Dalam Juta US\$):



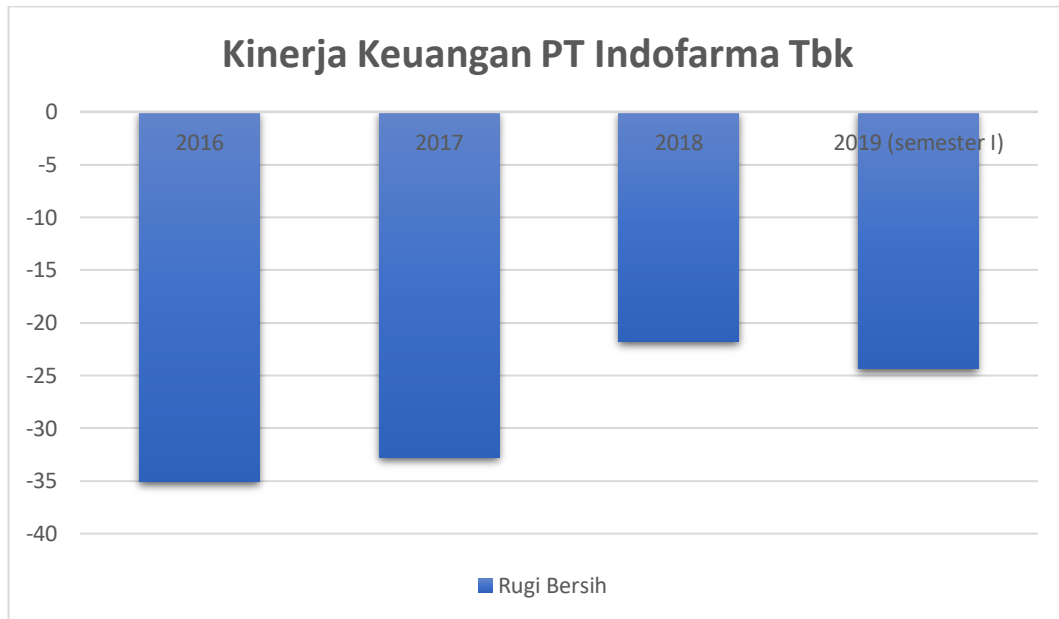
Fenomena selanjutnya, pada perusahaan BUMN sektor manufaktur yaitu PT Indofarma Tbk (INAF) mengalami kerugian yang dalam tiga tahun terakhir membawa sahamnya anjlok hingga 67% sepanjang tahun ini, hingga Senin (12/08/2019). Saham ini diketahui banyak dicari investor di mesin pencari google. Sejak tahun 2016, perusahaan farmasi pelat merah tersebut sudah tidak pernah mencicipi manisnya laba bersih meski pendapatannya naik-turun, berikut daftar kinerja keuangan PT Indofarma Tbk:

Tabel 1.2
Kinerja Keuangan PT Indofarma Tbk

Tahun	Rugi Bersih (miliar rupiah)
2016	-35.095
2017	-32.736
2018	-21.773
2019 (semester I)	-24.357

Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190812112315-17-91292/kinerja-susut-saham-indofarma-anjlok-hingga-60-lebih>

Berikut adalah grafik kerugian PT Indofarma Tbk:



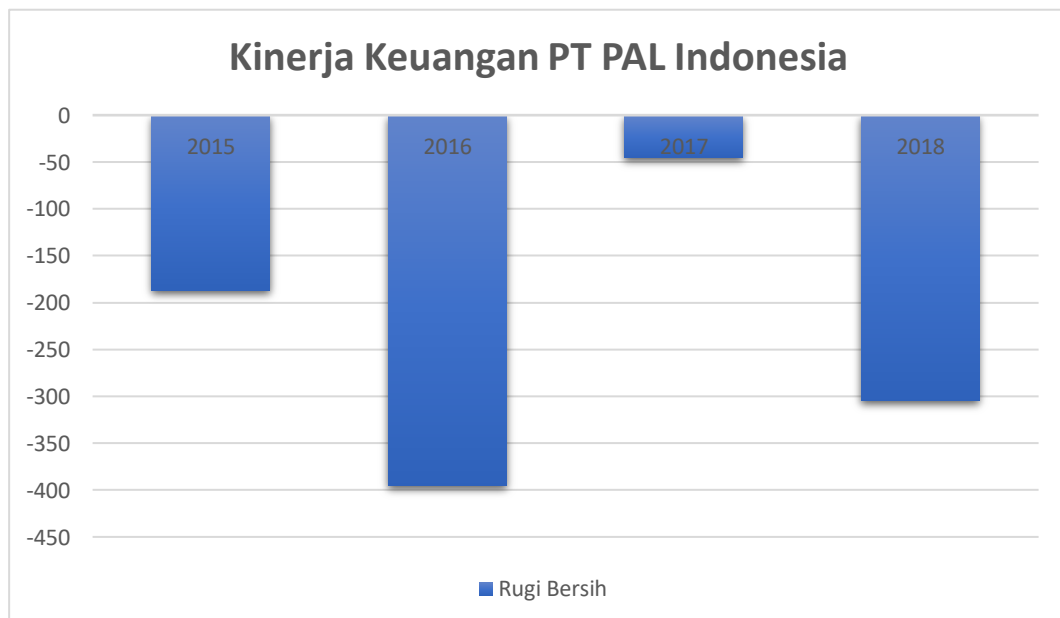
Kemudian pada fenomena lainnya yang terjadi pada perusahaan BUMN sektor manufaktur yaitu PT PAL Indonesia. PT PAL Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang industri galangan kapal. Berdasarkan catatan yang dirilis Kementerian BUMN, perusahaan ini mengalami rugi pada 2015, perusahaan menderita rugi Rp187 miliar, tahun 2016 sebesar Rp395 miliar dan tahun 2017 sebesar 45,3 miliar. Sementara di tahun 2018, PAL menderita rugi Rp304 miliar. Berikut daftar kinerja keuangan PT PAL Indonesia:

Tabel 1.3
Kinerja Keuangan PT PAL Indonesia

Tahun	Rugi Bersih (dalam miliar rupiah)
2015	-187
2016	-395
2017	-45,3
2018	-304,16

Sumber : <https://www.matamatapolitik.com/tujuh-bumn-yang-merugi-sepanjang-2019-listicle/>

Berikut adalah grafik kerugian PT PAL Indonesia:



Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih kurang maksimal, bahkan masih ada perusahaan BUMN yang mengalami kerugian walaupun sudah disuntik dengan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Sebagai pendekatan yang strategis untuk mengelola suatu risiko, perusahaan cenderung mengambil pendekatan yang terintegrasi daripada melihat manajemen risiko dari perspektif tradisional. Manajemen risiko tradisional adalah sistem dimana risiko dikelola secara terpisah, setiap departemen cenderung tidak mau membagikan ide maupun informasi kepada departemen lain dalam satu perusahaan. Pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi ini disebut dengan *Enterprise Risk Management* (Florio dan Leoni, 2017). *Enterprise Risk Management* berpengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan (Mohamad A'ar Pranatha dkk, 2018).

Enterprise Risk Management (ERM) merupakan suatu proses yang mencakup suatu entitas organisasi yang dipengaruhi oleh individu pada semua tingkatan manajerial dalam organisasi dan dipergunakan untuk kepentingan formulasi strategi. Tujuannya untuk mengintegrasikan semua jenis risiko dan menanganinya menggunakan alat yang terintegrasi dan teknik untuk mengurangi risiko di seluruh lini bisnis secara terarahkan, penerapan ERM ini lebih baik dibandingkan dengan Manajemen Risiko Tradisional yang belum sepenuhnya terintegrasi dan tidak transparan. Meulbroek (2002) mengemukakan bahwa integrasi mengacu pada kedua kombinasi memodifikasi operasi perusahaan, menyesuaikan struktur modal dan menggambarkan instrumen keuangan.

Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) mendefinisikan ERM sebagai budaya, kapabilitas, dan praktik yang terintegrasi dengan penentuan dan eksekusi strategi, yang diandalkan oleh organisasi untuk mengelola risiko dalam menciptakan, memelihara, dan mewujudkan nilai (COSO, 2017).

Faktor lain yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah *Intellectual Capital* yang artinya *Intellectual Capital* berpengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan (Wahyudi dkk, 2015). Di Indonesia, *Intellectual Capital* semakin berkembang setelah munculnya PSAK No. 19 tahun 2012 tentang aktiva tidak berwujud. Menurut PSAK No. 19, aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik yang sering kali mengeluarkan sumber daya maupun menimbulkan liabilitas dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan atau peningkatan sumber daya tak berwujud, seperti ilmu pengetahuan atau teknologi, desain implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar, dan merk dagang (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012).

Pengungkapan *Intellectual Capital* perlu untuk dilakukan oleh suatu perusahaan dikarenakan adanya permintaan transparansi yang meningkat, sehingga informasi *Intellectual Capital* membantu investor menilai kemampuan perusahaan dengan baik, dan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang melakukan pengungkapan *Intellectual Capital* memiliki nilai lebih di mata para investor, karena para investor cenderung lebih tertarik pada perusahaan yang menyajikan informasi secara lengkap tentang

perusahaannya (G.A Sirojudin dan I Nazaruddin, 2014). *Intellectual Capital* juga diyakini dapat menjadi suatu kekuatan bagi perusahaan untuk mendapatkan kesuksesan dalam dunia bisnis dan seringkali juga digunakan menjadi faktor utama dalam pencapaian laba perusahaan (Putri, dkk., 2016).

Intellectual capital (modal intelektual) adalah asset tidak berwujud berupa sumber daya informasi serta pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bersaing serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut ***International Federation of Accountant (IFAC)*** terdapat beberapa istilah yang hampir mirip dengan *intellectual capital*, antara lain *intellectual property*, *intellectual asset*, *knowledge asset* yang semuanya bermaksud sebagai saham atau modal yang berbasis pada pengetahuan yang dimiliki perusahaan (Widyaningrum, 2004)

Faktor berikutnya yang juga perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan adalah *Corporate social Responsibility*. Penerapan CSR dipercaya dapat meningkatkan kinerja keuangan dimana investor cenderung berinvestasi pada perusahaan yang melakukan kegiatan CSR. Perusahaan yang memiliki kepedulian sosial dapat menggunakan informasi sosial sebagai salah satu keunggulan kompetitif perusahaan (Zuhroh dan Sukmawati, 2003). Selain itu, CSR memiliki keterkaitan dengan kinerja keuangan di negara- negara berkembang walaupun membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keterkaitan yang signifikan tersebut (Ahmed, Islam dan Hasan, 2012). Aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan terbukti memiliki dampak produktif yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (Dahlia dan Siregar, 2008).

Secara teori CSR seharusnya dapat menjadi pertimbangan investor sebelum berinvestasi, karena didalamnya mengandung informasi sosial yang telah dilakukan perusahaan. Dengan pelaporan dan pengungkapan CSR, para stakeholder dapat mengevaluasi bagaimana pelaksanaan CSR dan memberikan penghargaan/sanksi terhadap perusahaan sesuai hasil evaluasinya (Wahyuni dkk, 2015).

Corporate social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) merupakan suatu komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat disekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan (Budimanta, 2002).

Selain *Enterprise Risk Management*, *Intellectual Capital* dan *Corporate Social Responsibility*, salah satu faktor yang menyebabkan buruknya kinerja keuangan perusahaan di Indonesia adalah rendahnya penerapan pengelolaan perusahaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Padahal *Good Corporate Governance* dewasa ini sudah menjadi komitmen dunia internasional dan juga nasional. Berbagai kajian telah menunjukkan bahwa krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi di negara-negara asia pada akhir tahun 1990-an, salah satunya disebabkan oleh rendahnya *Good Corporate Governance* yang mengabaikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dalam melakukan transaksi-transaksi usaha (Edah Jubaedah 2009). Maka dari itu, *Good Corporate Governance* berpengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Wahyuni dkk, 2015).

Kelemahan BUMN antara lain; masih rendahnya penerapan GCG, belum berfungsinya sistem perencanaan dan pengendalian intern, rendahnya integritas Direksi, praktik mark-up, terjadinya penyimpangan oleh direksi BUMN, pemberian paket remunerasi yang berlebihan kepada Direksi yang tidak mencerminkan keterkaitan dengan pencapaian target kinerja, transaksi bisnis dengan pihak luar yang dilakukan manajemen kurang memperhatikan kepentingan perusahaan, intervensi pemegang saham atau pihak luar secara berlebihan dalam kegiatan operasional BUMN, dan adanya praktik perusahaan dalam perusahaan yang dilakukan manajemen. Belum optimalnya kinerja BUMN dikarenakan penggunaan modal yang tidak efisien serta kurangnya perhatian terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Sedangkan faktor lainnya adalah pendanaan melalui utang yang berlebihan atau over leveraging, kesalahan model bisnis dan meningkatnya persaingan, semua permasalahan tersebut berujung pada rendahnya kinerja perusahaan (Salsabila dan Muhammad, 2017).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP117/MMB/2002 (2002: pasal 1), mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut : “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.”

Sedangkan Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) pengertian *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang

mengatur hubungan pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni Agustina, Gede Adi Yuniarta dan Ni Kadek Sinarwati dengan judul “Pengaruh *Intellectual Capital*, *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2013)” yang menemukan bahwa *Intellectual Capital*, *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis termotivasi untuk melakukan pengembangan penelitian dengan judul ” **Pengaruh *Enterprise Risk Management*, *Intellectual Capital*, *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur Pada Tahun 2014-2018)**”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka perlu adanya ruang lingkup untuk mempermudah penjelasannya. Dengan penelitian ini penulis membuat batasan ruang lingkup atau merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Enterprise Risk Management* pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur.
2. Bagaimana *Intellectual Capital* pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur.
3. Bagaimana *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur.
4. Bagaimana *Good Corporate Governance* pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur.
5. Bagaimana Kinerja Keuangan pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur.
6. Seberapa besar pengaruh *Enterprise Risk Management, Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur secara parsial.
7. Seberapa besar pengaruh *Enterprise Risk Management, Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur secara simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *Enterprise Risk Management* pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur.

2. Untuk mengetahui *Intellectual Capital* pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur.
3. Untuk mengetahui *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur.
4. Untuk mengetahui *Good Corporate Governance* pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur.
5. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Enterprise Risk Management*, *Intellectual Capital*, *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur secara parsial.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Enterprise Risk Management*, *Intellectual Capital*, *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu dalam bidang akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai Pengaruh *Enterprise Risk Management*, *Intellectual Capital*, *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur.

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak instansi terkait untuk lebih mengetahui seberapa pengaruh *Enterprise Risk Management*, *Intellectual Capital*, *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur.

3. Bagi Pembaca

Bagi pembaca pada umumnya diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan juga sumber pemikiran yang bermanfaat dalam membangun bangsa lebih baik lagi untuk kedepannya melalui ilmu akuntansi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari *Annual Report* masing-masing perusahaan. Dengan waktu penelitian sejak bulan Februari 2020 sampai dengan selesai

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab kajian pustaka, ditemukan teori-teori, hasil penelitian sebelumnya dan publikasi umum yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Dalam permasalahan penelitian secara eksplisit memuat variabel-variabel penelitian. Dalam bab ini peneliti mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan variabel-variabel penelitian.

2.1.1 *Enterprise Risk Management*

2.1.1.1 *Pengertian Enterprise Risk Management*

Pada Juni 2017 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) merilis perubahan kerangka kerja manajemen risiko *Enterprise Risk Management Framework – Integrating with Strategy and Performance*. Perubahan tersebut merefleksikan pentingnya kaitan antara strategi dan kinerja, menawarkan perspektif konsep dan aplikasi manajemen risiko yang saat ini ada dan berkembang, serta memperbarui definisi inti dari risiko dan manajemen risiko organisasi. Salah satu penyempurnaan yang paling signifikan adalah pengenalan komponen dan prinsip-prinsip pendukung yang mencerminkan evolusi pemikiran dan praktik manajemen risiko.

COSO's *Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance* (COSO ERM Framework) (2017) mendefinisikan manajemen risiko sebagai berikut:

“The culture, capabilities and practices, integrated with strategy-setting and performance, that organizations rely on to manage risk in creating, preserving and realizing value.”

Maksud dari definisi diatas manajemen risiko merupakan budaya, kapabilitas, dan praktik yang terintegrasi dengan penentuan dan eksekusi strategi, yang diandalkan oleh organisasi untuk mengelola risiko dalam menciptakan, memelihara, dan mewujudkan nilai.

Menurut COSO (2004) :

“Enterprise Risk Management adalah sebuah proses yang melibatkan keseluruhan entitas, mulai dari dewan direksi, manajemen, dan pejabat lainnya, yang diaplikasikan ke dalam penyusunan strategi dan melingkupi keseluruhan perusahaan, yang didesain untuk mengidentifikasi kejadian yang berpotensi yang dapat berakibat pada entitas , dan mengelola risiko pada tingkat risiko yang dikehendaki untuk menyediakan penjaminan yang wajar dalam rangka mencapai tujuan dari entitas.”

Menurut Tunggal (2009):

“Enterprise Risk Management adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh Dewan perusahaan, manajemen, personil lain entitas tersebut, diterapkan dalam penetapan strategi dan berlaku di seluruh perusahaan, di rancang untuk mengenali peristiwa potensial yang dapat mempengaruhi entitas itu, dan mengelola risiko agar tetap ada dalam jangkauan risikonya, sehingga dapat memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan entitas.”

Menurut Irham Fahmi (2015:2) adalah sebagai berikut:

“Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.”

Menurut Darmawi (2014:17) adalah sebagai berikut:

“Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.”

Menurut Meizaroh dan Lucyanda (2011) bahwa:

“Manajemen risiko atau *enterprise risk management* merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengelola semua risiko dalam perusahaan. Pendekatan terhadap pengelolaan risiko organisasi sering disebut dengan manajemen risiko.”

Menurut Edo dan Luciana (2013) adalah sebagai berikut:

“Manajemen risiko adalah proses dimana metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola risikonya yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan, dan risiko merupakan bagian yang ada di dalam suatu bisnis.”

Berdasarkan pengertian *enterprise risk management* yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa *enterprise risk management* merupakan strategi perusahaan dalam pengelolaan risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang, yang melibatkan anggota perusahaan dalam rangka memberikan keyakinan penuh terhadap tujuan perusahaan.

2.1.1.2 Manfaat *Enterprise Risk Management*

Menurut Darmawi (2014:5) manfaat manajemen risiko dibagi menjadi 5 (lima) kategori utama:

1. Manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan.
2. Manajemen risiko menuang secara langsung peningkatan laba.
3. Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung.
4. Adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya

perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non material bagi perusahaan itu.

5. Manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan karena kreditur pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi maka secara tidak langsung menolong meningkatkan *public image*.

Menurut Darmawi (2014) hal tersebut dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan berurutan yaitu:

1. Identifikasi risiko, mengetahui adanya risiko, sifat risiko yang dihadapi dan dampaknya. Identifikasi risiko merupakan proses penganalisan untuk menemukan secara sistematis risiko yang mungkin timbul.
2. Pengukuran risiko, menganalisa atau mengukur risiko yang mungkin terjadi untuk menentukan prioritas risiko mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan atau mengurangnya.
3. Pengendalian risiko, dengan cara menghindari risiko, mengedalikan kerugian, memisahkan kegiatan yang berisiko dan kombinasi dari ketiga cara diatas serta pemindahan risiko.

Menurut Irham Fahmi (2015:3) dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa kegunaan atau manfaat yang akan diperoleh yaitu:

1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
4. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
5. Dengan adanya *risk management concept* (konsep manajemen risiko) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara *suistainable* (berkelanjutan).

2.1.1.3 Pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Pengungkapan manajemen risiko adalah sebagai pengungkapan atas risiko-

risiko yang dikelola perusahaan dalam mengendalikan risiko yang berkaitan dimasa yang akan datang. Pengungkapan risiko merupakan upaya perusahaan untuk menjelaskan kepada pengguna laporan tahunan mana yang tidak sesuai, sehingga dapat dijadikan faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan manajemen risiko adalah proses dimana metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola risikonya yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan, dan risiko merupakan bagian yang ada di dalam suatu bisnis menurut Edo dan Luciana (2013).

Menurut Edo dan Luciana (2013) pengungkapan *Enterprise Risk Management* adalah:

“Pengungkapan manajemen risiko adalah sebagai pengungkapan atas risiko-risiko yang dikelola perusahaan dalam mengendalikan risiko yang berkaitan dimasa yang akan datang. Pengungkapan risiko merupakan upaya perusahaan untuk dapat menjelaskan kepada pengguna laporan tahunan mana yang tidak sesuai, sehingga dapat dijadikan faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan.”

Menurut Devi, dkk (2017):

“Pengungkapan ERM merupakan informasi pengelolaan risiko atas yang dilakukan oleh perusahaan dan mengungkapkan dampaknya terhadap masa depan perusahaan. Pengungkapan ERM dapat membantu pihak perusahaan untuk menginformasikan kepada pihak eksternal perusahaan terkait risiko perusahaan yang sangat kompleks.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan *enterprise risk management* merupakan informasi yang diungkapkan perusahaan mengenai pengelolaan risiko beserta dampak yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

2.1.1.4 Kerangka *Enterprise Risk Management*

Menurut COSO *Enterprise Risk Management Integrated Framework* (2017)

ada lima kerangka prinsip *Enterprise Risk Management*, yaitu :

1. *Governance and Culture* (Tata Kelola dan Budaya)
2. *Strategy and Objective-Setting* (Strategi dan Penentuan Tujuan)
3. *Performance* (Kinerja)
4. *Review and Revision* (Penelaahan dan Revisi)
5. *Information, Communication, and Reporting* (Informasi, Komunikasi, dan Pelaporan)

Penjelasan dari ke lima prinsip tersebut yaitu:

1. *Governance and Culture* (Tata Kelola dan Budaya)

Tata kelola mengatur organisasi, memperkuat pentingnya, dan menetapkan tanggung jawab pengawasan untuk manajemen risiko perusahaan. Budaya berkaitan dengan nilai-nilai etika, perilaku yang diinginkan, dan pemahaman risiko dalam entitas.

2. *Strategy and Objective-Setting* (Strategi dan Penentuan Tujuan)

Manajemen risiko perusahaan, strategi, dan penetapan tujuan bekerja bersama dalam proses perencanaan strategis. Selera risiko ditetapkan dan diselaraskan dengan strategi; tujuan bisnis menerapkan strategi dalam praktik yang berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi, menilai, dan merespons risiko

3. *Performance* (Kinerja)

Risiko yang dapat memengaruhi pencapaian strategi dan tujuan bisnis perlu diidentifikasi dan dinilai. Risiko diprioritaskan oleh tingkat keparahan dalam konteks risk appetite. Organisasi kemudian memilih tanggapan risiko

dan mengambil pandangan portofolio dari jumlah risiko yang telah diasumsikan. Hasil dari proses ini dilaporkan kepada pemangku kepentingan risiko utama.

4. *Review and Revision* (Penelaahan dan Revisi)

Dengan meninjau kinerja entitas, organisasi dapat mempertimbangkan seberapa baik komponen manajemen risiko perusahaan berfungsi dari waktu ke waktu dan mengingat perubahan substansial, dan revisi apa yang diperlukan.

5. *Information, Communication, and Reporting* (Informasi, Komunikasi, dan Pelaporan)

Manajemen risiko perusahaan memerlukan proses berkelanjutan untuk mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan, baik dari sumber internal dan eksternal, yang mengalir naik, turun, dan melintasi organisasi.

Enterprise Risk Management Framework menurut *COSO* (2017) terdiri dari 8 komponen yang saling terkait yaitu (1) lingkungan internal, (2) penetapan sasaran, (3) identifikasi kejadian, (4) penilaian risiko, (5) perlakuan risiko, (6) aktivitas pengendalian, (7) informasi dan komunikasi, dan (8) pemantauan. Kedelapan komponen ini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang meliputi tujuan strategis, operasional, pelaporan keuangan, maupun kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Berikut ini adalah penjelasan dari komponen- komponen *ERM*:

1. Lingkungan internal (*internal environment*)

Mengidentifikasi kondisi internal perusahaan, meliputi kekuatan dan kelemahan organisasi. Penerapan dalam perusahaan berupa pembagian tugas dan wewenang, Standar operasional (SOP), pembagian struktur organisasi.

2. Penetapan sasaran (*objective setting*)

Sasaran kegiatan manajemen risiko harus sejalan dengan sasaran dari perusahaan. Penerapan dalam perusahaan yaitu perusahaan agar berjalan efektif dan efisien, dan menghilangkan biaya-biaya yang tidak diperlukan.

3. Identifikasi kejadian (*event identification*)

Kejadian internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan harus diidentifikasi, meliputi risiko dan kesempatan yang akan timbul. Penerapan dalam perusahaan antara lain, penggelapan barang milik perusahaan, absensi yang tidak sesuai, kolusi dan nepotisme dalam organisasi.

4. Penilaian risiko (*risk assessment*)

Risiko dianalisis berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Hasil analisis risiko akan dijadikan dasar untuk menentukan perlakuan risiko. Penerapan dalam perusahaan berupa apakah pelanggaran yang dilakukan sering terjadi dan apakah berdampak pada perusahaan.

5. Perlakuan risiko (*risk respons*)

Terdapat empat alternatif pada perlakuan risiko, yaitu menghindari (*avoidance*), menerima (*acceptance*), mengurangi (*reduction*), dan

membagi risiko (*sharing*). Pemilihan perlakuan risiko dilakukan dengan membandingkan hasil analisis risiko dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*. Penerapan dalam perusahaan dengan mencegah pelanggaran yang terjadi, dan apabila sudah terjadi diberikan hukuman yang jelas.

6. Aktivitas pengendalian (*control activities*)

Membangun dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk memastikan perlakuan risiko diterapkan dengan efektif. Penerapan dalam perusahaan yaitu review tentang anggaran dan target, rekonsiliasi, *konsinyering*.

7. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)

Informasi yang relevan diidentifikasi, diperoleh, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat agar personil dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Penerapan dalam perusahaan dengan cara meeting/rapat manajemen dengan karyawan untuk mengkomunikasikan target dan kebijakan manajemen

8. Pemantauan (*monitoring*)

Seluruh proses manajemen resiko harus dipantau, dievaluasi dan dikembangkan, apakah efektif menangani permasalahan yang ada.

Penerapan dalam perusahaan berupa evaluasi dengan target setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahunan.

Untuk melakukan penilaian ERM sebagai acuan, indikator yang digunakan adalah *ERM Disclosure Index*. Indeks ini terdiri dari 108 item pengungkapan. Berikut adalah indikator-indikator pengungkapan ERM sebagaimana dikemukakan

oleh COSO dalam Sunitha Devi, dkk.,2017:30:

Tabel 2.1
Daftar Indikator Pengungkapan ERM

1. Lingkungan Internal	
RMD 1	Apakah ada piagam dewan?
RMD 2	Informasi tentang kode etik/etika?
RMD 3	Informasi tentang bagaimana kebijakan kompensasi menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham?
RMD 4	Informasi tentang target kinerja individu?
RMD 5	Informasi tentang prosedur pengangkatan dan pemecatan anggota dewan dan manajemen?
RMD 6	Informasi tentang kebijakan remunerasi anggota dewan dan manajemen?
RMD 7	Informasi tentang program pelatihan, pembinaan dan pendidikan?
RMD 8	Informasi tentang pelatihan dalam nilai-nilai etis?
RMD 9	Informasi tentang tanggung jawab dewan?
RMD 10	Informasi tentang tanggung jawab komite audit?
RMD 11	Informasi tentang tanggung jawab CEO?
RMD 12	Informasi tentang eksekutif senior yang bertanggung jawab untuk manajemen risiko?
RMD 13	Informasi tentang pengawasan supervisor dan pengawasan manajer?
2. Penetapan Tujuan	
RMD 14	Informasi tentang misi perusahaan?
RMD 15	Informasi tentang strategi perusahaan?
RMD 16	Informasi tentang tujuan bisnis perusahaan?
RMD 17	Informasi tentang adopsi <i>benchmark</i> untuk mengevaluasi hasil?
RMD 18	Informasi tentang persetujuan strategi dengan dewan?
RMD 19	Informasi tentang strategi, tujuan, dan nilai pemegang saham?
3. Identifikasi Kejadian	
a. Risiko Keuangan	
RMD 20	Informasi tentang tingkat likuiditas?

RMD 21	Informasi tentang tingkat suku bunga?
RMD 22	Informasi tentang kurs mata uang asing?
RMD 23	Informasi tentang biaya modal?
RMD 24	Informasi tentang akses ke pasar modal?
RMD 25	Informasi tentang instrumen utang jangka panjang?
RMD 26	Informasi tentang risiko <i>default</i> ?
RMD 27	Informasi tentang risiko solvabilitas?
RMD 28	Informasi tentang risiko harga ekuitas?
RMD 29	Informasi tentang risiko komoditas?
b. Risiko Kepatuhan	
RMD 30	Informasi tentang masalah litigasi?
RMD 31	Informasi tentang kepatuhan terhadap peraturan?
RMD 32	Informasi tentang kepatuhan dengan kode industri?
RMD 33	Informasi tentang kepatuhan dengan kode sukarela?
RMD 34	Informasi tentang kepatuhan dengan rekomendasi <i>corporate governance</i> ?
c. Risiko Teknologi	
RMD 35	Informasi tentang pengelolaan data?
RMD 36	Informasi tentang sistem komputer?
RMD 37	Informasi tentang informasi privasi pada pelanggan?
RMD 38	Informasi tentang keamanan <i>software</i> /perangkat lunak?
d. Risiko Ekonomi	
RMD 39	Informasi tentang sifat persaingan?
RMD 40	Informasi tentang peristiwa ekonomi makro yang dapat mempengaruhi perusahaan?
e. Risiko Reputasi	
RMD 41	Informasi tentang isu-isu lingkungan?
RMD 42	Informasi tentang masalah etika?
RMD 43	Informasi tentang kesehatan dan isu-isu keselamatan?
RMD 44	Informasi tentang saham yang lebih rendah/tinggi atau peringkat kredit?
4. Penilaian Risiko	
RMD 45	Penilaian risiko tingkat likuiditas?
RMD 46	Penilaian risiko suku bunga?
RMD 47	Penilaian risiko nilai tukar asing?
RMD 48	Penilaian risiko dari biaya modal?
RMD 49	Penilaian risiko dari akses ke pasar modal?

RMD 50	Penilaian risiko instrumen utang jangka panjang?
RMD 51	Penilaian risiko <i>default</i> ?
RMD 52	Penilaian risiko solvabilitas?
RMD 53	Penilaian risiko harga ekuitas?
RMD 54	Penilaian risiko komoditas?
RMD 55	Penilaian risiko masalah litigasi?
RMD 56	Penilaian risiko kepatuhan terhadap regulasi/peraturan?
RMD 57	Penilaian risiko kepatuhan dengan kode industri?
RMD 58	Penilaian risiko kepatuhan dengan kode sukarela?
RMD 59	Penilaian risiko kepatuhan dengan rekomendasi <i>corporate governance</i> ?
RMD 60	Penilaian risiko pengelolaan data?
RMD 61	Penilaian risiko sistem komputer?
RMD 62	Penilaian risiko informasi privasi pada pelanggan?
RMD 63	Penilaian risiko pada keamanan <i>software</i> /perangkat lunak?
RMD 64	Penilaian risiko sifat persaingan?
RMD 65	Penilaian risiko isu-isu lingkungan?
RMD 66	Penilaian risiko dari masalah etika?
RMD 67	Penilaian risiko kesehatan dan isu-isu keselamatan?
RMD 68	Penilaian risiko saham yang lebih rendah/tinggi atau peringkat kredit?
RMD 69	Informasi tentang teknik yang digunakan untuk menilai dampak potensial dari penggabungan kejadian?
5. Respon Risiko	
RMD 70	Gambaran umum proses untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola?
RMD 71	Informasi tentang pedoman tertulis tentang bagaimana risiko harus dikelola?
RMD 72	Respon terhadap risiko likuiditas?
RMD 73	Respon terhadap risiko suku bunga?
RMD 74	Respon terhadap risiko nilai tukar asing?
RMD 75	Respon terhadap risiko biaya modal?
RMD 76	Respon terhadap akses ke pasar modal?
RMD 77	Respon terhadap instrumen utang jangka panjang?

RMD 78	Respon terhadap risiko <i>default</i> ?
RMD 79	Respon terhadap risiko solvabilitas?
RMD 80	Respon terhadap risiko harga ekuitas?
RMD 81	Respon terhadap risiko komoditas?
RMD 82	Respon terhadap risiko masalah litigasi?
RMD 83	Respon terhadap kepatuhan regulasi/peraturan?
RMD 84	Respon terhadap kepatuhan kode industri?
RMD 85	Respon terhadap kepatuhan kode sukarela?
RMD 86	Respon terhadap kepatuhan rekomendasi dari <i>corporate governance</i> ?
RMD 87	Respon terhadap risiko pengelolaan data?
RMD 88	Respon terhadap risiko sistem komputer?
RMD 89	Respon terhadap informasi privasi pada pelanggan?
RMD 90	Respon terhadap risiko keamanan <i>software</i> /perangkat lunak?
RMD 91	Respon terhadap risiko persaingan?
RMD 92	Respon terhadap risiko lingkungan?
RMD 93	Respon terhadap risiko etika?
RMD 94	Respon terhadap kesehatan dan isu-isu keselamatan?
RMD 95	Respon terhadap risiko saham yang lebih rendah/tinggi atau peringkat kredit?
6. Kegiatan Pengawasan	
RMD 96	Informasi tentang pengawasan penjualan?
RMD 97	Informasi tentang penelaahan fungsi dan efektivitas pengawasan?
RMD 98	Informasi tentang isu-isu otorisasi?
RMD 99	Informasi tentang dokumen dan catatan sebagai pengawasan?
RMD 100	Informasi tentang prosedur verifikasi independen?
RMD 101	Informasi tentang pengawasan fisik?
RMD 102	Informasi tentang proses pengawasan?
7. Informasi dan Komunikasi	
RMD 103	Informasi tentang verifikasi kelengkapan, akurasi dan validitas?
RMD 104	Informasi tentang saluran komunikasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran undang-undang, peraturan atau kejanggalan lainnya?
RMD 105	Informasi tentang saluran komunikasi dengan pelanggan, pemasok

	dan pihak eksternal lainnya?
8. Pemantauan	
RMD 106	Informasi tentang bagaimana proses yang pemantauan?
RMD 107	Informasi tentang audit internal?
RMD 108	Informasi tentang anggaran audit internal?

2.1.2 *Intellectual Capital*

2.1.2.1 Pengertian *Intellectual Capital*

Intellectual Capital diperlakukan sebagai *intangible assets*. Meskipun demikian, menyajikan cukup perbedaan dengan meletakkan *intellectual capital* sebagai bahan terpisah dasar penetapan *intangibile assets* secara keseluruhan suatu perusahaan. Dengan demikian, terdapat item-item *intangible asset* yang secara logika tidak membentuk bagian dari *intellectual capital* suatu perusahaan (Gustami, 2010:23).

Pengertian *intellectual capital* menurut Stewart (2010:12):

“Intellectual capital is the sum of every thing everbody in a company knows that gives it a competitive edge. Intellectual capital is intelectual material-konowledge, information, intellectual property, experience-that can be put to use ti creat wealth.”

Menurut Moehariono (2012:305) *intellectual capital* sebagai berikut:

“Intellectual capital adalah pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (ability) yang dimiliki oleh suatu kolektivitas sosial, seperti sebuah organisasi komunitas intelektual, atau praktik profesional serta intelektuall capital mewakili sumber daya yang bernilai tinggi dan berkemampuan untuk bertindak yang didasarkan pada pengetahuan.”

Selanjutnya Suryana (2011:5) mengemukakan bahwa:

“Modal intelektual dapat diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai modal utama yang disertai pengetahuan, kemampuan, keterampilan, komitmen, dan tanggung jawab sebagai modal tambahan. Ide merupakan modal utama yang akan membentuk modal lainnya.”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa *intellectual capital* merupakan suatu aset yang tidak berwujud yang sangat membantu dalam menciptakan kekayaan perusahaan melalui daya pikir yang efektif dianggap suatu unsur dari penciptaan nilai tambah perusahaan.

2.1.2.2 Pengungkapan *Intellectual Capital*

Saat ini pengungkapan *intellectual capital* memberikan manfaat yang lebih besar dibanding masa lalu. Terutama bagi sektor yang mempunyai karakteristik industri dominan yang kemudian mengalami perubahan, seperti dari sektor manufaktur berubah menjadi *high technology*, finansial dan jasa asuransi (Guthrie dan Petty, 2000).

Menurut Ihyaul Ulum (2009:148) pengungkapan *intellectual capital* adalah:

“*Disclosure intellectual capital* dalam suatu laporan keuangan sebagai salah satu cara untuk mengungkapkan bahwa laporan tersebut menggambarkan aktifitas perusahaan yang kredibel, terpadu (kohersif) serta *true and fair*.”

Menurut Klaudia Julindra dan Liana Susanto (2015) pengungkapan *intellectual capital* adalah:

“Pengungkapan adalah merupakan cara bagi suatu perusahaan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk *annual report*. Pengungkapan modal intelektual berguna untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* sumber daya intelektual yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan dapat meminimalkan asimetri informasi.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan

intellectual capital merupakan pemberian informasi mengenai modal intelektual yang dimiliki suatu perusahaan kepada para *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya.

2.1.2.3 Faktor-Faktor Pengungkapan *Intellectual Capital*

Perusahaan-perusahaan melakukan pengungkapan *intellectual* karena berbagai alasan. Menurut Widjanarko (2006) dalam Heni Otavian dan Wahidahwati (2014) lima alasan perusahaan-perusahaan melaporkan *intellectual capital* yaitu sebagai berikut:

1. Pelaporan *intellectual capital* dapat membantu organisasi merumuskan strategi bisnis. Dengan mengidentifikasi dan mengembangkan *intellectual capital* suatu organisasi untuk mendapatkan *competitive advantage*.
2. Pelaporan *intellectual capital* dapat membawa pada pengembangan indikator-indikator kunci prestasi perusahaan yang akan membantu mengevaluasi hasil-hasil pencapaian strategi.
3. Pelaporan *intellectual capital* dapat membantu mengevaluasi *merger* dan akuisisi perusahaan, khususnya untuk menentukan harga yang dibayarkan oleh perusahaan pengakuisisi.
4. Menggunakan pelaporan *intellectual capital nonfinancial* dapat dihubungkan dengan rencana intensif dan kompensasi perusahaan. Alasan pertama sampai dengan keempat, merupakan alasan internal dari perusahaan dalam melaporkan *intellectual capital*.
5. Alasan ini merupakan alasan eksternal perusahaan yaitu mengkomunikasikan pada *stakeholder* eksternal tentang *intellectual property* yang dimiliki perusahaan.

2.1.2.4 Komponen *Intellectual Capital*

Pada umumnya, para peneliti mengidentifikasi komponen *intellectual capital* menjadi tiga bagian meliputi *human capital*, *structural (organizational) capital* dan *customer (relational) capital*.

Menurut Moehariono (2012:305):

“*Intellectual capital* terdiri dari tiga elemen utama, yaitu *human capital* (modal manusai), *structural capital* atau *organizational capital* (modal organisasi), dan *costumer capital* atau *relational capital* (modal pelanggan).”

Berikut penjelasan mengenai tiga elemen utama *intellectual capital* tersebut:

1. Modal Manusia (*Human Capital*)

Human capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut.

2. Modal Struktural (*Structural Capital/ Organizational Capital*)

Structural capital atau *organizational capital* merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan.

3. Modal Relasional (*Relational Capital*)

Relational capital atau *customer capital* (modal pelanggan) merupakan hubungan yang harmonis yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari pemasok yang andal dan berkualitas berasal dari pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar.

Pengungkapan *IC* diprosikan dengan indeks *IC disclosure* sesuai dengan dimensi pengungkapan *IC* yang digunakan oleh Singh dan Zahn (2007) dalam Devi dkk (2017). Indeks ini terdiri dari 81 item yang diklasifikasikan kedalam enam kategori yaitu: 1) karyawan; 2) pelanggan; 3) teknologi informasi; 4) proses; 5) riset dan pengembangan; dan 6) pernyataan strategis. Berikut adalah indikator-indikator pengungkapan *IC* :

Tabel 2.2
Daftar Indikator Pengungkapan *Intellectual Capital*

Karyawan (27 Item)	
1.	Karyawan dibagi dalam kelompok umur
2.	Karyawan dibagi dalam kelompok senioritas
3.	Karyawan dibagi dalam kelompok gender
4.	Karyawan dibagi dalam kelompok kewarganegaraan
5.	Karyawan dibagi dalam kelompok departemen
6.	Karyawan dibagi dalam kelompok fungsi jabatan/kerja
7.	Karyawan dibagi dalam kelompok tingkat pendidikan
8.	Tingkat perputaran karyawan <i>Turn over</i> kerja adalah tingkat dimana banyak atau tidaknya perputaran atau keluar masuk tenaga kerja pada suatu perusahaan.
9.	Komentar mengenai peningkatan/penurunan jumlah karyawan
10.	Komentar mengenai kesehatan dan keamanan karyawan
11.	Tingkat absensi karyawan Tingkat absensi adalah prosentase besarnya ketidakhadiran tenaga kerja alam satu semester.
12.	Komentar mengenai tingkat absensi karyawan
13.	Diskusi tentang <i>interview</i> karyawan
14.	Pernyataan tentang kebijakan pengembangan kompetensi
15.	Deskripsi tentang program pengembangan kompetensi dan aktivitasnya
16.	Beban pendidikan dan pelatihan
17.	Beban pendidikan dan pelatihan perjumlah karyawan
18.	Beban karyawan perjumlah karyawan
19.	Kebijakan rekrutmen perusahaan Rekrutmen adalah proses menarik, <i>skrining</i> , dan memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaan. Semua perusahaan dalam industri apa pun bisa mendapatkan keuntungan dari kontingensi atau mempertahankan perekrutan profesional atau proses alih daya untuk agen perekrutan.

20.	Departemen SDM, divisi, atau fungsinya
21.	Kesempatan perputaran fungsi atau jabatan
22.	Kesempatan berkarir
23.	Sistem remunerasi dan insentif Remunerasi adalah total kompensasi yang diterima pegawai sebagai diasosiasikan dengan penghargaan dalam bentuk uang (<i>monetary reward</i>), atau dapat diartikan juga sebagai upah atau gaji. Insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.
24.	Pensiun Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda). Seseorang yang pensiun biasanya hak atas dana pensiun atau pesangon. Jika mendapat pensiun, maka ia tetap dana pensiun sampai meninggal dunia.
25.	Kebijakan asuransi
26.	Pernyataan tentang ketergantungan terhadap personel kunci
27.	Penghasilan per karyawan
28.	Nilai tambah per karyawan
Pelanggan (14 Item)	
29.	Jumlah pelanggan
30.	Penjualan dibagi dalam kelompok pelanggan
31.	Penjualan tahunan per segmen atau produk
32.	Rata-rata pembelian per pelanggan
33.	Ketergantungan pada pelanggan kunci
34.	Deskripsi tentang keterlibatan pelanggan dalam operasi perusahaan
35.	Deskripsi tentang hubungan dengan pelanggan
36.	Pendidikan atau pelatihan pelanggan
37.	Raiso pelanggan per karyawan
38.	Nilai tambah per pelanggan atau segmen
39.	<i>Market share</i> absolut (%) dalam industri Pangsa pasar adalah salah satu indikator utama perusahaan gunakan untuk mengukur seberapa baik mereka lakukan dibandingkan pesaing. Pasar adalah persentase bisnis atau penjualan sebuah perusahaan pegang dar bisnis keseluruhan atau penjualan oleh semua pesaing gabungan di pasar tertentu. Total bisnis yang bersedia disebut potensi pasar.
40.	<i>Market share</i> relatif perusahaan (tidak dinyatakan dalam %)
41.	<i>Market share</i> berdasarkan negara, segmen atau produk.
42.	Pembelian kembali oleh pelanggan.
Teknologi Informasi (6 Item)	

43.	<p>Deskripsi inventasi TI</p> <p>Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenalkan dengan istilah <i>Information Tecnology</i> (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk ada, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa elektronik, dan peranti genggam modern</p>
44.	Alasan investasi <i>TI</i>
45.	Deskripsi Sistem <i>TI</i>
46.	<p>Aset <i>Software</i></p> <p><i>Software</i> atau perangkat lunak komputer merupakan istilah khususnya untuk data yang diformat serta disimpan dalam bentuk secara digital, termasuk didalamnya program-program komputer, dokumentasi, berbagai informasi yang dapat dibaca serta di tulis oleh komputer.</p> <p><i>Software</i> adalah sekumpulan data-data elektronik yang disimpan serta diatur oleh komputer. Data-data elektronik yang disimpan tersebut dapat berupa program ataupun instruksi yang akan menjalankan berbagai macam perintah. Dengan melalui <i>software</i> inilah suatu komputer mampu untuk dapat menjalankan suatu perintah atau berbagai macam perintah yang dijalankan</p>
47.	Deskripsi mengenai fasilitas <i>TI</i>
48.	Informasi beban <i>TI</i>
Proses (9 Item)	
49.	Informasi dan komunikasi dalam perusahaan
50.	Usaha berkaitan dengan lingkungan kerja
51.	Pekerjaan yang dilakukan dari rumah
52.	Pembagian pengetahuan dan informasi secara internal
53.	Pembagian pengetahuan dan informasi secara eksternal
54.	Ukuran kegagalan proses internal
55.	Ukuran kegagalan proses eksternal
56.	Diskusi tentang tujangan tambahan dan program sosial perusahaan
57.	Penerimaan lingkungan dan pernyataanya atau kebijakan
Riset dan Pengembangan (9 Item)	
58.	Pertanyaan tentang kebijakan, strategi, dan tujuan aktivitas R&D
59.	Beban R&D
60.	Rasio beban R&D terhadap penjualan
61.	Investasi R&D dalam riset dasar
62.	Investasi R&D dalam desain atau pengembangan produk
63.	<i>Detail</i> R&D dalam desain atau pengembangan produk
64.	<i>Detail</i> prospek masa depan yang sudah dimiliki perusahaan

65.	Jumlah paten, lisensi, dan lain-lain
66.	Informasi mengenai paten yang belum diputuskan (<i>ending</i>)
Pernyataan Strategi (15 Item)	
67.	Deskripsi tentang teknologi produksi yang baru
68.	Pernyataan tentang kualitas kinerja perusahaan
69.	Informasi tentang aliansi strategik perusahaan Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih sekelompok untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen.
70.	Tujuan dan alasan aliansi strategik
71.	Komentar terhadap dampak aliansi strategik
72.	Deskripsi jaringan <i>supplier</i> dan distributor
73.	Pernyataan tentang <i>image</i> dan <i>brand</i> Citra merek mengacu pada skema memori akan sebuah merek, yang berisikan interpretasi konsumen atas atribut, kelebihan, penggunaan, situasi, para pengguna, dan karakteristik pemasar dan/atau karakteristik pembuat dari produk/merek tersebut. Citra merek adalah apa yang konsumen pikirkan dan rasakan ketika mendengar atau melihat nama suatu merek (Setiadi 2003) Brand adalah segala sesuatu yang terkait dengan perusahaan, produk, atau layanan. Semua atribut, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
74.	Pernyataan tentang budaya perusahaan Menurut Susanto, AB (1997:3): “Suatu nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan, sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka harus bertindak atau berperilaku.”
75.	Pernyataan tentang <i>best practice</i>
76.	Struktur organisasional perusahaan
77.	Pemanfaatan energi, bahan baku, dan bahan masukan lainnya
78.	Deskripsi pada lingkungan
79.	Deskripsi tentang keterbatasan komunitas Keterlibatan komunitas perusahaan (<i>Corporate Community Involvement</i>) adalah salah satu wajah tanggungjawab sosial perusahaan dalam prakteknya. Cutlip et al (1985) dalam kutipan tersebut di atas memperjelas bahwa keterlibatan yang semacam itu sampai kepada kepentingan diri yang mendasar, untuk memungkinkan perusahaan agar bisa hidup mudah. Webel dan Wortmal (2000:124) sepedapat bahwa “Perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang kompetitif dengan mempunyai itikad baik komunitas-komunitas lokal.”

80.	Informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan tujuan Tanggung jawab sosial perusahaan atau <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya). Perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, <i>CSR</i> berhubungan erat dengan “ <i>pemangunan berkelanjutan</i> ”, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang yang lebih panjang.
81.	Deskripsi tentang kontrak karyawan atau isu kontrak

2.1.3 *Corporate Social Responsibility*

2.1.3.1 *Pengertian Corporate Social Responsibility*

Menurut Johnson and Johnson dalam Nor Hadi (2014: 46) definisi *corporate social responsibility* sebagai berikut:

“*Corporate social responsibility (CSR) is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society.*”

Dari pernyataan diatas maka dapat di simpulkan bahwa *corporate social responsibility* merupakan tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat.

Menurut *World Business Council on Sustainable Development (WBCSD)* dalam Rusdianto (2013: 7) *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut:

“*Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethical and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of local community and society at large*”

Dari pernyataan diatas maka dapat di simpulkan bahwa *corporate social responsibility* merupakan komitmen berkelanjutan dari suatu bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta masyarakat lokal dan masyarakat luas.

Pengertian *corporate social responsibility* menurut ISO 26000 dalam Rusdianto (2013: 7) adalah sebagai berikut:

“Tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang: konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder*; sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional; terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal satu butir tiga adalah sebagai berikut:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

2.1.3.2 Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Aktivitas CSR memiliki fungsi strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social security*). Dengan menjalankan CSR, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga harus turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan jangka

panjang. Menurut Rusdianto (2013: 13) terdapat manfaat CSR bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu:

1. Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
2. Meningkatkan citra perusahaan.
3. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
4. Mempertahankan posisi merek perusahaan.
5. Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (*equity*)
7. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.
8. Mempermudah pengelolaan manajemen resiko (*risk management*).

Rusdianto (2013: 13) menyatakan bahwa:

“Keputusan perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan, merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program CSR akan menimbulkan efek lingkaran emas yang tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, melainkan juga stakeholder. Bila CSR mampu dijalankan secara efektif maka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat, pemerintah dan lingkungan”.

2.1.3.3 Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility*

Ranah tanggung jawab sosial (*social responsibility*) mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Disamping itu, tanggung jawab sosial juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk itu, dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, banyak ahli mencoba menggarisbawahi prinsip dasar yang terkandung dalam tanggung jawab sosial (Nor Hadi, 2014).

Crowther David dalam Nor Hadi (2014:59) mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (*social responsibility*) menjadi tiga, yaitu:

1. “*Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan

aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, sustainability berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana *society* memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.

2. *Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal.
3. *Transparency*, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Dan transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak lingkungan.”

2.1.3.4 Konsep *Corporate Social Responsibility*

Konsep CSR yang diakomodasi dalam Undang-undang Perseroan terbatas (UU PT) pasal 74 nomor 40 tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

2.1.3.5 Kategori Perusahaan Menurut Implementasi CSR

Perilaku para pengusaha pun beragam, dari kelompok yang sama sekali tidak melaksanakan sampai ke kelompok yang telah menjadikan CSR sebagai nilai

inti (*core value*) dalam menjalankan usaha. Terkait dengan praktik CSR, pengusaha dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu kelompok hitam, merah, biru, dan hijau (Sukmadi, 2010:136).

Tabel 2.3

Kategori Perusahaan Menurut Implementasi CSR

Peringkat	Keterangan
Hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan yang sudah menempatkan CSR pada strategi jantung dan inti bisnisnya • CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi kebutuhan yang merupakan modal sosial.
Biru	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan yang menilai praktik CSR akan memberi dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi bukan biaya.
Merah	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan peringkat merah yang memulai menerapkan CSR. CSR masih dipandang sebagai komponen biaya yang mengurangi keuntungan perusahaan.
Hitam	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatannya degenerative • Mengutamakan kepentingan bisnis • Tidak peduli aspek sosial disekelilingnya

2.1.3.6 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Hery (2012: 143) pengungkapan *corporate social responsibility* adalah sebagai berikut:

“Pengungkapan CSR yang sering juga disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, atau *social accounting* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan”.

Pratiwi dan Djahhuri (2004) dalam Rahmawati (2012: 183) mendefinisikan pengungkapan *corporate social responsibility* adalah sebagai berikut:

“Pengungkapan sosial sebagai suatu pelaporan atau penyampaian

informasi kepada *stakeholders* mengenai segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya”.

Sedangkan menurut Crowther (2008:106) pengertian pengungkapan *corporate social responsibility* adalah sebagai berikut:

“Corporate Social Disclosure can be defined as the provision of financial and non-financial information relating to an organization’s interaction with its physical and social environment, as stated in annual report or separate social reports. Corporate Social Disclosure includes details of the physical and social environment, energy, human resources, products and community involvement matters.”

Dari pernyataan diatas maka dapat di simpulkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* dapat didefinisikan sebagai penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan sosial, sebagaimana dinyatakan dalam laporan tahunan atau laporan sosial yang terpisah. Pengungkapan *Corporate Social* mencakup rincian lingkungan fisik dan sosial, energi, sumber daya manusia, produk dan hal-hal keterlibatan masyarakat.

Kewajiban mengungkapkan kegiatan CSR perusahaan dalam *annual report* perusahaan tercantum dalam pasal 66 ayat (2) dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang- kurangnya:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Faktor - faktor Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* menurut Deegan dalam Rusdianto (2013:44) menjelaskan ada banyak hal yang membuat perusahaan mengungkapkan CSR-nya, yaitu:

1. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam undang-undang.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi.
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.
4. Keinginan untuk memenuhi persyaratan peminjaman.
5. Pemenuhan kebutuhan informasi pada masyarakat.
6. Sebagai konsekuensi atas ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
7. Untuk mengukur kelompok *stakeholder* yang mempunyai pengaruh yang kuat.
8. Untuk mematuhi persyaratan industri tertentu.
9. Untuk mendapatkan penghargaan pelaporan tertentu.

Teori-teori yang Melandasi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*:

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency Theory mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal (pemegang saham) merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen (manajemen) merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal dengan agen. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu komitmen manajemen untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam kinerja sosial. Dengan demikian, manajemen akan mendapatkan penilaian positif dari stakeholders (Wardani dan Januarti, 2013)

2. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Legitimasi masyarakat merupakan factor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu, dapat dijadikan wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Nor Hadi, 2014: 87)

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. O'Donovan (2002) dalam Nor Hadi (2014: 87) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*).

Gray et. al, dalam Nor Hadi (2014: 88) berpendapat bahwa legitimasi merupakan :

“a systems-oriented view of organization and societypermits us to focus on

the role of information and disclosure in the relationship between organisations, the state, individuals and group”.

Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada *society*, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat (Nor Hadi, 2014: 88)

3. Teori *Stakeholder* (*Stakeholder theory*)

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. *stakeholder is a group or an individual who can affect, or be affected by, the success or failure of an organization* (Luk, Yau, Tse, Alan, Sin, Leo dan Raymond, 2005). Dengan demikian, *stakeholder* merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan (Nor Hadi, 2014: 94).

Menurut Hummels dalam Nor Hadi (2014: 94):

“(stakeholder are) individuals and groups who have legitimate claim on the organization to participate in the decision making process simply because they are affected by the organisation’s practices, policies and actions.”

Batasan *stakeholder* tersebut di atas mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholder*, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan *stakeholder* bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeleminasi legitimasi *stakeholder* (Nor Hadi, 2014: 94).

Jones, Thomas dan Andrew dalam Nor Hadi (2014: 94) menyatakan bahwa pada hakikatnya *stakeholder theory* mendasarkan diri pada asumsi antara lain:

1. *The corporation has relationship with many constituency groups (stakeholder) that effect and are affected by its decision* (Freeman, 1984).
2. *The theory is concerned with nature of these relationship in terms of both processes and outcomes for the firm and its stakeholder.*
3. *The interests of all (legitimate) stakeholder have intrinsic value, and no set of interests is assumed to dominate the others* (Clakson, 1995; Donaldson & Preston 1995).
4. *The theory focuses on managerial decision making* (Donaldson & Preston 1995).

Berdasar pada asumsi dasar *stakeholder theory* tersebut, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial (*social setting*) sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi *stakeholder* serta mendudukannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern* (Adam. C.H, dalam Nor Hadi, 2014:94-95).

Esensi teori *stakeholder* tersebut di atas jika ditarik interkoneksi dengan teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi *expectation gap* dengan masyarakat (publik) sekitar guna meningkatkan legitimasi (pengakuan) masyarakat, ternyata terdapat benang merah. Untuk itu, perusahaan hendaknya menjaga reputasinya yaitu dengan menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata diukur dengan *economic measurement* yang cenderung *shareholder orientation*, ke arah memperhitungkan faktor sosial (*social factors*) sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan (*stakeholder orientation*) (Nor Hadi, 2014: 95).

Item-item Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* menurut Wibisono (2007), terdapat banyak standar yang harus dijadikan pijakan dalam praktik pertanggungjawaban sosial (*social responsibility*). *Equator Principles* yang diadopsi beberapa negara, merumuskan beberapa prinsip, antara lain:

1. *Accountability's (AA1000) standard*, yang mengacu pada prinsip “*Triple Bottom Line*” dari John Elkington. Standar berbasis prinsip yang diakui untuk organisasi yang membantu untuk menjadi lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan. Standar tersebut adalah kerangka kerja *open source* yang dikembangkan melalui konsultasi multi-pihak dan proses *review*. Standar ini dirancang agar kompatibel dengan standar kunci lain termasuk pedoman GRI, SA8000, seri ISO dan standar akuntansi keuangan.
2. *Global Reporting Initiative (GRI)*, yang merupakan panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh PBB lewat *Coalition for Environmental Economies (CERES)* dan UNEP pada tahun 1997. GRI merupakan organisasi non-profit yang

mempromosikan keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan. GRI menyediakan kerangka pelaporan keberlanjutan yang komprehensif bagi semua perusahaan dan organisasi yang banyak digunakan diseluruh dunia. Perjalanan panjang panduan laporan keberlanjutan (sustainability reporting guidelines) yang dimotori GRI berawal dari tahun 1997. Saat itu GRI baru dibentuk di Boston, Amerika Serikat, oleh United Nations Environment Programme (UNEP), Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES), dan Tellus Institute. Setelah dibentuk, GRI melahirkan panduan laporan keberlanjutan untuk pertama kalinya pada tahun 2000. GRI kemudian melakukan revisi terhadap panduan laporan keberlanjutan dalam kurun waktu tertentu dan pada umumnya menggunakan penamaan atau pengkodean yang spesifik. GRI G2 atau versi 2 diterbitkan pada tahun 2002. Kemudian GRI G3, GRI G3.1, GRI G4 diluncurkan berurutan pada tahun 2006, 2011, dan 2013. Di antara perubahan berbagai versi GRI, transformasi GRI G3.1 ke GRI G4 memiliki perubahan yang cukup signifikan dalam hal penyusunan laporan keberlanjutan. Panduan GRI versi G3.1 dan versi yang sebelumnya masih mengusung konsep “application level”. Skema ini membagi laporan ke dalam tiga level, yaitu A, B, dan C sesuai kriteria tertentu dan berdasarkan jumlah indikator yang diungkapkan. Pengungkapan indikator pada level C relatif yang paling sedikit dan level A relatif yang terbanyak sesuai konteks perusahaan masing-masing.

3. *Social Accountability International SA8000*

Standard SA 8000 adalah standar yang fokus pada tenaga kerja dan kondisi tempat kerja. SA8000 didasarkan pada ISO 9000 teknik mengaudit, menentukan perbaikan dan tindakan pencegahan untuk terus mendorong perbaikan dan berfokus pada system manajemen dan dokumentasi untuk membuktikan sistem ini. Sertifikasi SA8000 dilakukan secara independen, eksternal auditor dan berhubungan dengan kinerja perusahaan.

4. *ISO 14000 Environmental Management Standard*

ISO 14000 adalah standar yang terkait dengan pengelolaan lingkungan yang ada untuk membantu organisasi untuk meminimalkan dampak negatif operasi mereka terhadap lingkungan, memenuhi hukum, peraturan dan persyaratan berorientasi lingkungan dan semakin meningkatkannya.

5. *ISO 26000*

ISO 26000 adalah standar internasional yang memberikan bimbingan pada pelaporan keberlanjutan yang dibuat oleh *International Organization for Standardization (ISO)*.

Untuk melakukan penilaian CSR sebagai acuan, indikator yang digunakan adalah *Global Reporting Initiative G4*, yang mana terdapat 91 item pengungkapan. Berikut adalah indikator-indikator pengungkapan CSR sebagaimana dikemukakan oleh GRI-4:

Tabel 2.4
Daftar Indikator Pengungkapan CSR

KATEGORI EKONOMI		
-Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program
	EC4	Bantuan financial yang diterima dari
-Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
-Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak

-Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan
KATEGORI LINGKUNGAN		
-Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
-Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
-Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifika dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali

-Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
	EN14	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan.
-Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK langsung (cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya

-Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tambahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel 2 lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkait dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
-Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
-Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpastian terhadap UU dan peraturan lingkungan
-Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja

-Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
-asesmen pemasok atas lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-mekanisme pengaduan masalah lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL SUB-KATEGORI: PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		
-Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah.
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan.
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender
-Hubungan industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama

-kesehatan dan Keselamatan Kerja VV	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
-Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan

-keberagaman dan kesetaraan peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
-Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
-Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang di ajukan, di tangani, dan di selesaikan melalui pengaduan resmi.
SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA		
-Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia

	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
-Non-diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
-kebebasan berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
-pekerja anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
-pekerja paksa atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
-praktik pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan dengan operasi

-hak adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
-Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
-asesmen pemasok atas hak asasi manusia	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal

SUB-KATEGORI: MASYARAKAT		
-Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
-Anti-Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
-Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
-Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hokum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
-Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang.

-Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	S09	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negative actual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
SUB-KATEGORI: TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK		
-kesehatan keselamatan pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis

-Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
	PR4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
-Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
	PR7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
-Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
-Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait

2.1.4 *Good Corporate Governance*

2.1.4.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif, yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses, bisnis, kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif dan pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Good Corporate Governance adalah sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan menciptakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 adalah : “Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP117/M-MB/2002 (2002:pasal 1), mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.”

Sedangkan pengertian Good Corporate Governance menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam publikasi yang pertanyaannya mempergunakan pengertian Calbury Committee dalam Hery (2010:11) adalah :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.”

Adapun pengertian mengenai GCG menurut Sukrisno Agoes(2013:101), yaitu:

“Tata kelola yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya .”

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:24):

“*Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan dan masyarakat sekitar”.

Dari beberapa definisi mengenai *Good Corporate Governance* diatas dapat disimpulkan, bahwa *corporate governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan, sekaigus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, kreditur dan masyarakat sekitar. *Good Corporate Governance* berusaha menjaga keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat.

2.1.4.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

The Indonesian Institute for Corporation (IICG) dalam Hamdani (2016:71), mengungkapkan beberapa prinsip pelaksanaan GCG yang berlaku secara internasional sebagai berikut :

1. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberikan informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan
2. Perlakuan sama terhadap pemegang saham, terutama kepada para pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam
3. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana diterapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
4. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*)
5. Tanggung jawab pengurus manajemen, pengawasan manajemen, serta penanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011

prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meliputi :

1. Transparansi (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
4. Kemandirian (*independency*)
5. Kewajaran (*fairness*).

Penjelasan dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut adalah:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan
2. Informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
3. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

4. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
6. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Sedarmayanti (2012:55-56), prinsip GCG terdiri dari:

1. *Fairnes* (Kewajaran)
2. *Disclosure dan Transparency* (Transparansi)
3. *Accountability* (Akuntabilitas)
4. *Responsibility* (Responsibilitas).

Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. *Fairnes* (Kewajaran)

Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.

2. *Disclosure dan Transparency* (Transparansi)

Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antar manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor, merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham.

4. *Responsibility* (Responsibilitas)

Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

Prinsip *Good Corporate Governance* menurut OECD dalam

Sedarmayanti (2012:56) mencakup 5 bidang utama yaitu :

1. Hak pemegang saham dan perlindungan
2. Peran karyawan dan pihak yang berkepentingan lainnya
3. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi sehubungan dengan struktur dan operasi korporasi
4. Tanggung jawab dewan (dewan komisaris maupun dewan direksi) terhadap perusahaan
5. Pemegang saham dan dan pihak berkepentingan lainnya.

Sebenarnya, tiga dari keempat prinsip GCG tersebut: transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab mempunyai arti yang sangat erat dan tumpang-tindih. Keempat prinsip ini merupakan jawaban langsung atas permasalahan/skandal yang dihadapi oleh dunia usaha, bukan hanya di Indonesia tetapi juga diseluruh dunia.

2.1.4.3 Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:184) unsur-unsur (*person in charge*) dalam *Good Corporate Governance* yang baik terdiri atas :

1. Pemegang saham (*stakeholders*)
2. Komisaris dan Direksi
3. Komite audit
4. Sekretaris Perusahaan
5. Manajer dan karyawan
6. Auditor eksternal
7. Auditor internal
8. *Stakeholder* lainnya.

Penjelasan mengenai unsur-unsur dalam *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. Pemegang saham (*stakeholders*), adalah individu atau institusi yang mempunyai taruhan vital (*vital stake*) dalam perusahaan. *Corporate Governance* harus melindungi hak-hak pemegang saham antara lain :
 - a. Mengamankan registrasi dan kepemilikan
 - b. Menyerahkan atau memindahkan saham
 - c. Mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu dan kontinu
 - d. Ikut serta dan memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
 - e. Memperoleh bagian atas keuntungan perusahaan

2. Komisaris dan Direksi, secara legal bertanggung jawab untuk menetapkan sasaran korporat, mengembangkan kebijakan yang luas, dan memilih personel tingkat atas untuk melaksanakan sasaran dan kebijakan tersebut, dan juga menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan kepentingan pemegang saham dilindungi.
3. Komite audit, bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
4. Sekretaris Perusahaan, fungsi ini harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur perusahaan tercatat atau pejabat perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan tercatat tersebut dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan.
5. Manajer dan karyawan, manajer menempati posisi yang strategis karena pengetahuan mereka dan pengambilan keputusan, biasanya mengambil peranan penting dalam organisasi. Pekerja khususnya yang diwakili serikat pekerja atau mereka yang memiliki saham dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan tata kelola perusahaan tertentu.
6. Auditor eksternal, bertanggung jawab memberikan opini/pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi

dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan.

7. Auditor internal, melaksanakan pelayanan kepada organisasi secara lebih luas dengan memberikan jaminan keyakinan, konsultasi dan memastikan pelaksanaan *corporate governance*.
8. *Stakeholder* lainnya, pemerintah terlibat dalam *corporate governance* melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. Kreditor yang memberikan pinjaman mungkin juga mempengaruhi kebijakan perusahaan.

Menurut Adrian Sutedi (2011 : 41), unsur-unsur yang dimiliki *corporate governance*, yaitu:

“*Corporate Governance* memiliki unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan (dan selalu diperlukan di dalam perusahaan), serta unsur-unsur yang ada di luar perusahaan (dan yang selalu diperlukan di luar perusahaan) yang bisa menjamin berfungsinya *good corporate governance*”.

Penjelasan dari unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Corporate Governance* - Internal Perusahaan

Adalah unsur yang berada di dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan. Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah:

- a. pemegang saham;
- b. direksi;
- c. dewan komisaris
- d. manajer;
- e. karyawan/serikat pekerja;
- f. sistem remunerasi berdasarkan kinerja;

g. komite audit;

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi:

- a. Keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*);
- b. Transparansi;
- c. *Accountability*;
- d. *Fairness*;
- e. Aturan dari *code of conduct*.

2. *Corporate Governance* - Eksternal Perusahaan

Adalah unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang diperlukan di luar perusahaan. Unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:

- a. kecukupan undang-undang dan perangkat hukum;
- b. investor;
- c. institusi penyedia informasi;
- d. akuntan publik;
- e. institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan;
- f. pemberi pinjaman;
- g. lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:

- a. aturan dari *code of conduct*;
- b. *fairness*;
- c. *accountability*;
- d. jaminan hukum.

Sedangkan menurut Hadi Setia Tunggal (2013 : 164), unsur-unsur (*person in charge*) dalam *corporate governance* yang baik terdiri atas:

1. Pemegang saham
2. Komisaris
3. Direksi
4. Komite audit
5. Sekertaris perusahaan
6. Manajer dan karyawan
7. Auditor eksternal
8. Auditor internal
9. *Stakeholder* lainnya (pemerintah, kreditor, dan lain-lain).

2.1.4.4 Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* tentunya memiliki manfaat dan tujuan. Menurut Hery (2010 : 5) setidaknya ada 5 (lima) manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *good corporate governance*, yaitu sebagai berikut:

1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4. Membantu manajemen dan *corporate board* dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi.

Tujuan dari *good corporate governance* menurut Sedarmayanti (2012:62) adalah:

1. Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan reponsibilitas

- agar perusahaan memiliki daya saing kuat, baik secara nasional atau internasional, serta menciptakan iklim yang mendukung investasi.
2. Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparansi dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi, dan rapat umum pemegang saham (RUPS)
 3. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral dan yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar perusahaan”.

Tujuan diterapkannya *good corporate governance* dalam perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas , dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional , transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ.
3. Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi”.

2.1.4.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Good Corporate Governance*

Ada dua faktor dalam GCG yaitu faktor internal dan faktor eksternal seperti yang dikutip Ristifani (2009) :

1. Faktor Internal
 - a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung

penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.

- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah- kaidah standar GCG
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2. Faktor Eksternal

- a. Pelaku dan lingkungan bisnis
Meliputi seluruh entitas yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan, seperti business community atau kelompok-kelompok yang signifikan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, serikat pekerja, mitra kerja, supplier dan pelanggan yang menuntut perusahaan mempraktekkan bisnis yang beretika. Kelompok-kelompok di atas dapat mempengaruhi jalannya perusahaan dengan derajat intensitas yang berbeda-beda.
- b. Pemerintah dan regulator
Pemerintah dan badan regulasi berkepentingan untuk memastikan bahwa Perusahaan mengelola keuangan dengan benar dan mematuhi semua peraturan dan undang-undang agar memperoleh kepercayaan pasar dan investor.
- c. Investor
Meliputi semua pihak yang berkaitan dengan pemegang saham dan pelaku perdagangan saham termasuk perusahaan investasi. Investor menuntut ditegakkannya atau dijaminnya pengelolaan perusahaan sesuai standar dan prinsip-prinsip etika bisnis.
- d. Komunitas Keuangan
Meliputi semua pihak yang berkaitan dengan persyaratan pengelolaan keuangan perusahaan termasuk persyaratan pengelolaan perusahaan terbuka, seperti komunitas bursa efek, Bapepam-LK, US SEC dan Departemen Keuangan RI. Setiap komunitas di atas mengeluarkan standar pengelolaan keuangan perusahaan dan menuntut untuk dipatuhi/dipenuhi oleh Perusahaan.

2.1.4.6 Pengungkapan *Good Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan

Laporan tahunan berisi pengungkapan informasi yang dapat membantu *stakeholders* dalam pengambilan keputusan. Informasi yang diungkapkan tidak hanya berupa informasi keuangan saja, tetapi juga laporan non keuangan. Selain digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengungkapan dalam laporan tahunan juga digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas manajemen atas kinerja pengelolaan perusahaan kepada para investor sebagai pemilik (Warsono dkk.,2009).

Darrough (dalam Na'im dan Rakhman, 2000) mengemukakan bahwa ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

1. Pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*):

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang diisyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Apabila perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

2. Pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*):

Pengungkapan sukarela merupakan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Healy dan Palepu (dalam Simanjuntak dan Widiastuti, 2004) mengemukakan bahwa meskipun semua perusahaan publik diwajibkan untuk memenuhi pengungkapan minimum, perusahaan berbeda secara substansial dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkapkan ke

pasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen.

Sementara itu, kata *disclosure* atau pengungkapan memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, *disclosure* berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Data di sini dapat berupa informasi keuangan dan informasi non-keuangan perusahaan yang relevan dalam pengambilan keputusan (Chariri dan Ghozali, 2007).

Casabona (2005) dalam Yuen, *et al.* (2010) mencatat bahwa kreditur dan investor global membuat keputusan investasi mereka berdasarkan berbagai informasi keuangan dan non-keuangan yang dipublikasikan, serta *economic reports* yang dikeluarkan oleh perusahaan publik. Adapun ketentuan umum mengenai bentuk dan isi laporan tahunan Emiten / Perusahaan Publik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam KEP-134/BL/2006, adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Data Keuangan Penting
2. Laporan Dewan Komisaris
3. Laporan Direksi
4. Profil Perusahaan
5. Analisis dan Pembahasan Manajemen
6. *Corporate Governance*
7. Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.
8. Laporan Keuangan yang Telah Diaudit.

Dalam ketentuan tersebut di atas, salah satu *item* yang harus dimuat adalah informasi tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

Praktik pengungkapan akuntansi di Indonesia mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK yang mengatur tentang pengungkapan laporan keuangan adalah PSAK No 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. PSAK No. 1 par 12 menyatakan bahwa:

Entitas dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengungkapan laporan keuangan, penyajian laporan tambahan juga diperlukan untuk membuat keputusan yang wajar dan relevan, termasuk informasi tentang CG demi melindungi kepentingan *stakeholders*.

Dari perspektif teori keagenan (*agency theory*), asimetri informasi merupakan keadaan di mana perusahaan mengetahui pengetahuan lebih luas tentang aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan dibandingkan dengan investor yang sudah ada maupun investor potensial. Keadaan ini juga berlaku dalam teori *stakeholder*, di mana informasi yang tidak memadai dialami oleh semua pemangku kepentingan, tidak hanya pemegang saham. Tanpa sebuah sistem yang terstruktur dari pengungkapan dan dalam pelaporan keuangan dalam bagian

khusus, akan sangat sulit bagi pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan dapat diandalkan, dan asimetri informasi yang terjadi akan menyebabkan *moral hazard* dan masalah *adverse selection* (Solomon, 2007). Dengan menerbitkan informasi mengenai aktivitas perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan, khususnya mengenai CG, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya akan dapat memantau kinerja perusahaan dan mengambil keputusan secara lebih baik.

Di Indonesia, kebijakan mengenai pengungkapan *corporate governance* diatur oleh BAPEPAM. BAPEPAM melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan yang memuat uraian singkat mengenai penerapan *corporate governance* perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan tahunan terakhir. Peraturan tersebut memuat 16 *point item* yang terdiri dari pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite manajemen risiko, komite-komite lain yang dimiliki perusahaan, anggota dewan direksi, dan anggota dewan komisaris, akses informasi dan data perusahaan, etika perusahaan, tanggung jawab sosial, pernyataan penerapan *good corporate governance*, dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*. Enam belas point item tersebut memuat 93 *item* pengungkapan yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*.

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia 2006 ini diterbitkan dalam kerangka dorongan etika. Pedoman ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat namun merupakan rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan GCG. Pedoman ini menjelaskan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi *checks and balance*, menegakkan transparansi dan akuntabilitas, serta merealisasikan tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan. Demi kepentingan ini, maka BAPEPAM mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (KNKG, 2006) yang mengatur tentang standar-standar pengungkapan *corporate governance* yang sebaiknya diungkapkan oleh perusahaan. *Item-item* tersebut terangkum dalam tabel 2.5

Tabel 2.5
Daftar Indikator Pengungkapan GCG

No	Klasifikasi	Item Pengungkapan
1.	Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai hak pemegang saham. 2. Pernyataan mengenai jaminan perlindungan hak atas pemegang saham perlakuan yang sama terhadap hak pemegang saham. 3. Tanggal pelaksanaan RUPS. 4. Hasil RUPS

2.	Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota Dewan Komisaris. 2. Status setiap anggota (komisaris independen atau komisaris bukan independen). 3. Latar belakang pendidikan dan karier Dewan Komisaris 4. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. 5. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris. 6. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris. 7. Jumlah rapat yang dihadiri. 8. Jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat. 9. Mekanisme pengambilan keputusan. 10. Program pelatihan Dewan Komisaris.
3.	Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing. 2. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi. 3. Latar belakang pendidikan dan karier anggota Direksi. 4. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. 5. Mekanisme pengambilan wewenang. 6. Mekanisme pendelegasian wewenang. 7. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Direksi 8. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi 9. Jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat 10. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi 11. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi

4.	Komite Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota Komite Audit. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite Audit. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit. 4. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat. 5. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Audit 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit. 7. Independensi anggota Komite Audit. 8. Keberadaan piagam Komite Audit.
5.	Komite Nominasi dan Remunerasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Riwayat hidup singkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan Komite Nominasi dan Remunerasi. 5. Jumlah kehadiran rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi. 7. Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
6.	Komite Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota Komite Manajemen Risiko. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite Manajemen Risiko. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko. 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko. 5. Jumlah kehadiran dalam setiap rapat. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Manajemen Risiko. 7. Independensi anggota Komite Manajemen Risiko.

7.	Komite Tata Kelola Perusahaan (GCG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite GCG. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite GCG. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite GCG. 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite GCG. 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite GCG. 7. Independensi anggota GCG.
8.	Komite-komite lain yang dimiliki oleh Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite. 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite. 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite. 7. Independensi anggota komite.
9.	Sekretaris Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Sekretaris Perusahaan. 2. Riwayat singkat Sekretaris Perusahaan. 3. Uraian mengenai tugas dan tanggungjawab Sekretaris Perusahaan.
10.	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang keberadaan SPI (Satuan Pengawas Internal). 2. Jumlah anggota SPI. 3. Jabatan masing-masing anggota SPI. 4. Uraian mengenai tugas dan tanggungjawab SPI. 5. Uraian mengenai aktivitas SPI selama setahun. 6. Penjelasan mengenai audit internal perusahaan.
11.	Manajemen Risiko Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. 2. Upaya untuk mengelola risiko-risiko tersebut

12.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara/gugatan. 2. Posisi kasus. 3. Status penyelesaian perkara/gugatan. 4. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan
13.	Akses informasi dan data perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan. 2. Daftar penyebaran informasi ke publik.
14.	Etika Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan mengenai budaya perusahaan yang dimiliki perusahaan
15.	Pernyataan Penerapan GCG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan prinsip-prinsip GCG. 2. Keberadaan pedoman pelaksanaan GCG dalam perusahaan. 3. Kepatuhan terhadap pedoman GCG. 4. Keberadaan Board Manual. 5. Struktur tata kelola perusahaan. 6. Hasil penerapan GCG selama setahun. 7. Audit GCG (jasa atestasi) oleh eksternal auditor.
16.	Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi perusahaan. 2. Misi perusahaan. 3. Nilai-nilai perusahaan. 4. Kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan direksi beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya. 5. Uraian mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan pasar modal. 6. Uraian mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan. 7. Uraian mengenai etika bisnis dalam perusahaan.

Sumber:

1. Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-134/BL/2006
2. Pedoman Umum *Corporate Governance* (KNKG, 2006)

2.1.5 Kinerja Keuangan

2.1.5.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Sucipto (2013) :

“Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba.”

Sedangkan menurut Fahmi (2012:2), definisi mengenai kinerja keuangan sebagai berikut :

“Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan- aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.”

Menurut Rudianto (2013:189):

“Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan yang dapat diukur menggunakan analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Kinerja Keuangan

Menurut Munawir (2010:31), pengukuran kinerja keuangan perusahaan mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

- a. Untuk mengetahui likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih.
- b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
- c. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan aset atau ekuitas secara produktif.
- d. Untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap stabil, yang diukur dari kemampuan perusahaan dalam membayar pokok utang dan beban bunga tepat waktu, serta pembayaran dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Kinerja keuangan mempunyai manfaat tertentu, berikut ini merupakan manfaat penilaian kinerja menurut Mulyadi (2007:416) dalam Sripeni (2014), penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk:

- a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
- b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
- d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
- e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

2.1.5.3 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio diperlukan untuk penilaian prestasi suatu usaha yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan.

Dengan analisis rasio keuangan dapat terlihat hasil yang telah di capai oleh perusahaan dalam periode tertentu dalam melaksanakan visi, misi, dan tujuan perusahaan tersebut.

Menurut Hery (2012: 12) pengertian mengenai rasio keuangan adalah :

“Rasio keuangan (financial ratio) merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan (neraca, laporan laba/rugi, laporan aliran kas).”

Sedangkan menurut Harahap (2010: 297), definisi rasio keuangan sebagai berikut:

“Rasio keuangan adalah angka yang di peroleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti), misalnya antara utang dan modal, antara kas dan total aset, antara harga pokok produksi dengan total penjualan , dan sebagainya tertentu dengan jumlah yang lain.”

Menurut Fahmi (2012: 44) mengenai rasio keuangan :

“Rasio keuangan dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan bisa juga secara sederhana disebut sebagai perbandingan jumlah dengan jumlah lainnya itulah dilihat perbandingannya dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban yang selanjutnya dijadikan bahan kajian untuk dianalisis dan diputuskan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan adalah penelaahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang akan diubah menjadi unit informasi yang lebih kecil sehingga dapat diketahui kondisi keuangan, prospek dari usaha serta efektifitas manajemennya. Informasi tersebut sangat berguna bagi pihak manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat bagi kelangsungan hidup perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio keuangan yang umum diperkenalkan dalam kebanyakan literatur dan yang sering digunakan adalah rasio

likuiditas, solvabilitas, aktifitas dan profitabilitas.

2.1.5.4 Jenis - Jenis Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan alat yang ikut berperan penting bagi pihak ekstern yang menilai suatu perusahaan dari laporan-laporan keuangan yang umum. Penilaian yang harus dilakukan terhadap laporan keuangan itu antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas.

Menurut Munawir (2012:238) ada 4 (empat) kelompok rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas.

- a. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan membiayai operasi dan memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.
- b. Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki.
- c. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil.
- d. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.

Menurut Riyanto (2010:331) juga mengelompokan rasio kedalam rasio-rasio likuiditas, rasio-rasio leverage, rasio-rasio aktivitas, dan rasio-rasio profitabilitas:

- a. Rasio Likuiditas adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur likuiditas perusahaan (*current ratio, acid test ratio*).
- b. Rasio Leverage Adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. (*debt to total assets ratio, net worth to debt ratio* dan lain sebagainya)
- c. Rasio Aktivitas yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dayanya (*inventory turnover, average collection period*, dan lain sebagainya).
- d. Rasio Profitabilitas yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari

sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan (*profit margin on sales*, *Return on total assets*, *return on net worth* dan lain sebagainya).

2.1.5.5 Rasio Profitabilitas

Profitabilitas atau disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.

Menurut Kasmir (2015:114) bahwa :

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.”

Menurut Sofyan Safri Harahap (2011:304) :

“Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya”.

Menurut (Harmono, 2011:110) :

“Konsep profitabilitas dalam teori keuangan sering digunakan sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen. Sesuai dengan perkembangan model penelitian bidang manajemen keuangan, umumnya dimensi profitabilitas memiliki hubungan kausalitas terhadap nilai perusahaan. Sedangkan nilai perusahaan secara konsep dapat dijelaskan oleh nilai yang ditentukan oleh harga saham yang diperjual belikan di pasar modal. Hubungan kausalitas ini menunjukkan bahwa apabila kinerja manajemen perusahaan yang diukur menggunakan dimensi-dimensi profitabilitas dalam kondisi baik, maka akan memberikan dampak positif terhadap keputusan investor di pasar modal untuk menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan modal.”

Menurut Hanafi dan Halim (2016: 81) :

“Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Ada

tiga rasio yang sering dibicarakan, yaitu: profit margin, return on total asset (ROA), dan return on equity (ROE).”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diungkapkan di atas dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur atau menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.

2.1.5.6 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Sama halnya dengan rasio-rasio lain, rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2015:197), adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengukur seluruh produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- f. Dan tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat dari rasio profitabilitas ini menurut Kasmir (2015:198) adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh.
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- e. Mengetahui seluruh produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.5.7 Pengukuran Rasio Profitabilitas

Secara umum untuk melakukan pengukuran rasio ini, terdapat beberapa jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Adapun jenis-jenis Profitabilitas menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/24/DPNP (2011) sebagai berikut:

1. *Return On Assets* (ROA)
2. *Return On Equity* (ROE)
3. *Net Interest Margin* (NIM)
4. Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Adapun penjelasan dari jenis-jenis profitabilitas adalah sebagai berikut ini:

1. *Return On Assets* (ROA)

Menurut Irham Fahmi (2012:137), *Return On Assets* (ROA) melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.”

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100$$

2. *Return On Equity* (ROE)

Menurut Irham Fahmi (2012:137), rasio return on equity (ROE) disebut juga laba atas equity. Rasio ini menilai sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

3. Net Interest Margin (NIM)

Menurut Taswan (2010:167) Net Interest Margin (NIM) adalah:

“Perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Rasio ini mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga bersih dengan penempatan aktiva produktif. Semakin besar rasio ini semakin baik kinerja bank dalam menghasilkan pendapatan bunga. Namun harus dipastikan bahwa ini bukan karena biaya intermediasi yang tinggi, asumsinya pendapatan bunga harus ditanamkan kembali untuk memperkuat modal bank.”

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Net Interest Margin} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Aktiva produktif}}$$

4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU tanggal

31 Juli 2013 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah:

“Rasio yang mengukur tentang perbandingan Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi untuk mengetahui tingkat efisiensi dan kemampuan bank tersebut dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan membagi antara Total beban operasional dan Total pendapatan operasional yang dihitung per posisi (tidak disetahunkan).”

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

Di dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan *Return On Assets* (ROA) sebagai proksi dari Kinerja Keuangan, karena rasio *Return On Assets* dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan tingkat aset tertentu.

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wahyuni Agustina, Gede Adi Yuniarta, Ni Kadek Sinarwati (2015)	<i>Pengaruh Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan</i>	Diperoleh hasil bahwa <i>Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan
2	Faradhika Nur Gradyanti dan Azib (2018)	<i>Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan Intellectual Capital, Terhadap Kinerja Keuangan</i>	Diperoleh hasil bahwa variabel <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan yang diukur dengan ROA sedangkan variabel <i>Intellectual</i>

			<p><i>Capital</i> tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Sedangkan secara simultan, variabel <i>Good Corporate Governance</i>, <i>Corporate Social Responsibility</i>, dan <i>Intellectual Capital</i> bersama-sama berpengaruh terhadap Variabel kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan ROA</p>
3	Mohamad A'ar Pranatha, Moeljadi, Erna Hernawati (2018)	Penerapan <i>Enterprise Risk Management</i> dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan	Diperoleh hasil bahwa <i>Enterprise Risk Management</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
4	Usman Risalatul Mungawanah (2018)	Pengaruh <i>Enterprise Risk Management</i> Terhadap Kinerja Perusahaan	Diperoleh hasil bahwa <i>Enterprise Risk Management</i> yang diukur dengan <i>ERMAdvanced</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.
5	Ingorn Nachailit, Nantana Ngamtampong, Piradee Paralit (2011)	<i>Effects of accounting information reporting on risk management capability of Thai export manufacturing firms</i>	Diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja
6	Jafari M, etal. (2011)	<i>Effective risk management and company's performance: Investment in</i>	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan

		<i>innovations and intellectual capital using behavioral and practical approach</i>	antara manajemen risiko dan kinerja perusahaan. Dapat dikatakan bahwa manajemen risiko dilakukan dengan baik maka kinerja perusahaan pun diharapkan dapat meningkat. Kinerja perusahaan disini dapat diukur berdasarkan kinerja keuangan dan kinerja non keuangan.
7	Maryam Mangantar (2019)	<i>The Influence of Corporate Social Responsibility and Corporate Governance on Banking Financial Performance</i>	Diperoleh hasil bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
8	Makki, Muhammad Abdul Majid, Lodhi, Sulaeman Aziz (2014)	<i>Impact of Corporate Governance, Intellectual Capital Efficiency and Financial Performance</i>	Diperoleh hasil bahwa terdapat dampak positif yang signifikan dari <i>intellectual capital</i> dan <i>corporate governance</i> terhadap kinerja keuangan
9	Mubeen Mujaheed, Arooj Abdullah (2014)	<i>Impact of Corporate Social Responsibility on Firms Financial Performance and Shareholders Wealth</i>	Diperoleh hasil bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berdampak positif pada Kinerja Keuangan Perusahaan

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Enterprise Risk Management* Terhadap Kinerja Keuangan

Enterprise Risk Management/manajemen risiko dapat artikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau bisnis.

Menurut Irham Fahmi (2013:21) :

“Hubungan manajemen risiko (*enterprise risk management*) dengan pengendalian internal, titik temu utamanya adalah kepentingan untuk melakukan pencegahan (*preventive action*) atau membangun sistem peringatan dini (*early warning system or alert system*) yang efektif di perusahaan, dimana berbagai risiko yang mungkin terjadi beserta dampaknya dapat diidentifikasi, diukur dan akhirnya dapat diminimalkan sekecil mungkin (*controllable risk*).”

Irham Fahmi (2013:22) menjelaskan bahwa kalimat-kalimat sederhana berikut ini memberikan gambaran lain tentang hubungan keduanya:

- *Internal Control* adalah alat untuk mendukung *Risk Management* dalam informasi lapangan, sekaligus sebagai *respons in action* terhadap hasil *Risk Management*
- Sebaliknya, *Risk Management* adalah acuan awal bagi seluruh aktifitas *Internal Control*, sekaligus alat evaluasi yang efektif untuk mengukur *Internal Control* yang sedang berjalan

Menurut Murwanto (2012:195) :

“Sistem pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi, pengendalian intern juga terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu kinerja”

Risiko dapat berasal dari dalam atau luar perusahaan. Risiko yang berasal

dari luar perusahaan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan, yang termasuk didalam risiko ini adalah tantangan yang berasal dari pesaing, perubahan kondisi ekonomi, kemajuan teknologi, peraturan pemerintah dan bencana alam. Risiko yang berasal dari dalam perusahaan berkaitan dengan aktivitas tertentu didalam organisasi misalnya karyawan yang tidak terlatih, karyawan yang tidak memiliki motivasi atau perubahan dalam tanggung jawab manajemen sehingga tidak efektifnya dewan direksi dan tim audit.

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang ditunjukkan Mohamad A'ar Pranatha, dkk (2018) bahwa *Enterprise Risk Management* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dengan menerapkan ERM budaya risiko perusahaan akan semakin baik. Jadi kontrol terhadap risiko akan semakin baik, sehingga meningkatkan kinerja keuangan. Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh Jafari M, et al. (2011) dan Nachailit, I et al. (2011), juga menemukan adanya pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja. Menurut Rini Lestari (2013) menyatakan bahwa manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap kinerja ,yaitu dengan semakin baik pelaksanaan manajemen risiko akan meningkatkan kinerja .

2.2.2 Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan

Intellectual capital merupakan suatu aset yang tidak berwujud yang sangat membantu dalam menciptakan kekayaan perusahaan melalui daya pikir yang efektif dianggap suatu unsur dari penciptaan nilai tambah perusahaan.

Menurut Ulum (2017: 203) :

“Semakin tinggi kinerja modal intelektual, maka akan semakin baik kinerja keuangan. Perusahaan yang memiliki kinerja modal intelektual yang baik, diyakini mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien”.

Menurut Solikhah, dd. (2010) dalam Gany dan Nugrahanti (2015):

”Perusahaan yang mampu mengelola sumber daya intelektualnya diyakini mampu menciptakan *value added* serta mampu menciptakan *competitive advantage* dengan melakukan inovasi, penelitian dan pengembangan yang akan bermuara terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan”.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wijayani (2017) yang menyatakan bahwa *intellectual capital* (modal intelektual) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Kondisi ini terjadi karena modal intelektual merupakan kekayaan intelektual yang berpusat pada sumber daya manusia yang berfungsi meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Jika kemampuan sumber daya manusia semakin baik, maka diharapkan akan menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan, sehingga kinerja keuangan semakin meningkat.

Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Pratama dan Achmad (2015) menyatakan bahwa dengan adanya konsep modal intelektual maka perusahaan akan mampu menghasilkan keunggulan kompetitif dan kinerja keuangan yang baik, yang artinya terdapat hubungan positif antara modal intelektual dengan kinerja keuangan.

2.2.3 Pengaruh *Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan*

Corporate Social Responsibility dapat diartikan sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang: konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder*; sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional; terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa

Menurut Nor Hadi (2011:128) :

“Tanggung jawab sosial merupakan sarana untuk mengurangi berbagai risiko dan complain yang muncul dari illigitimasi masyarakat yang dapat mengganggu profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk menginformasikan kepada stakeholder-nya, karena perusahaan mampu menunjukkan kepada mereka bahwa perusahaan dapat memenuhi harapan mereka terutama investor dan kreditor”.

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan lebih banyak maka kinerja keuangan cenderung akan meningkat.

Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh Retno dan Priatninah (2012) menyatakan bahwa bentuk tanggung jawab sosial perusahaan semakin banyak, maka *image* perusahaan semakin meningkat investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra baik di masyarakat, karena semakin baiknya citra perusahaan maka akan membuat konsumen memiliki loyalitas yang semakin tinggi sehingga profitabilitas pun semakin meningkat.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara CSR dengan kinerja keuangan. CSR seharusnya dapat menjadi pertimbangan investor sebelum berinvestasi, karena didalamnya mengandung informasi sosial yang telah dilakukan perusahaan. Dengan pelaporan dan pengungkapan CSR, para *stakeholder* dapat mengevaluasi bagaimana pelaksanaan CSR dan memberikan penghargaan/sanksi terhadap perusahaan sesuai hasil evaluasinya, sehingga CSR berpengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan.

2.2.4 Pengaruh *Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan*

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) akan mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien untuk meningkatkan kemandirian perusahaan, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial perusahaan terhadap para pemangku kepentingan yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Dengan adanya praktik bisnis yang sehat, perusahaan akan lebih mudah untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam hal ini perusahaan mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan perusahaan dan meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan

Menurut Tjager (2003:4) :

“Praktik GCG dapat meningkatkan nilai (valuation) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor.”

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan menurut Sunardi (2017) dan Thuy Nguyen (2017) adalah *Corporate Governance* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tri Purwani (2010), menyatakan bahwa secara teoritis, praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri, umumnya *good corporate governace* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang akan berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Selanjutnya penelitian lain yang telah dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2015) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan (diukur dengan nilai ROA). *Good Corporate Governace* dengan mekanisme pengukuran adalah kepemilikan manajerial akan menimbulkan dugaan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial maka akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Berikut penulis gambarkan kerangka pemikiran tentang Pengaruh *Enterprise Risk Management, Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan:

Landasan Teori

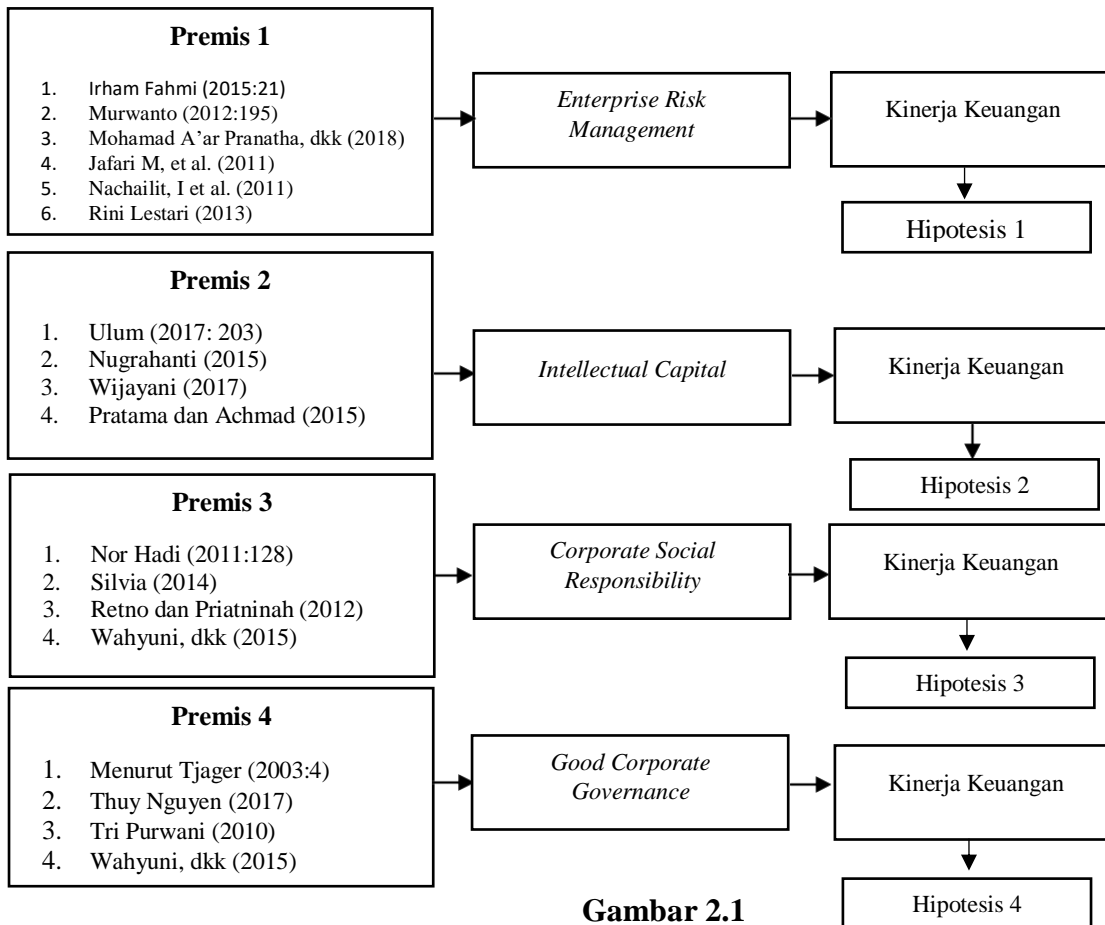
- **Enterprise Risk Management (X1):** COSO *ERM Integrated Framework* (2017), Irham Fahmi (2015:2), Meizaroh dan Lucyanda (2011), Edo dan Luciana (2013), Hoyt dan Lienbenberg (2011) dalam Oka dan Prima (2017)
- **Intellectual Capital (X2):** Stewart (2010:12), Moeheriono (2012:305), Suryana (2011:5),
- **Corporate Social Responsibility (X3):** Johnson dalam Nor Hadi (2014: 46), *World Business Council on Sustainable Development* (WBCSD) dalam Rusdianto (2013:7), ISO 26000 dalam Rusdianto (2013:7), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007
- **Good Corporate Governance (X4):** *Cadbury Committee of United Kingdom* dalam Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana (2011:101), *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI) dalam Muh. Arief Effendi (2016:3), Sukrisno Agoes(2013:101), Amin Widjaja Tunggal (2013:24)
- **Kinerja Keuangan (Y):** Sucipto (2013), Fahmi (2012:2), Rudianto (2013:189)

Referensi

1. Wahyuni Agustina, Gede Adi Yuniarta, Ni Kadek Sinarwati (2015)
2. Mohamad A'ar Pranatha, Moeljadi, Erna Hernawati (2018)
3. Usman Risalatul Mungawanah (2018)
4. Maryam Mangantar (2019)

Data Penelitian

1. Laporan keuangan perusahaan BUMN Sektor Manufaktur Periode 2014-2018
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh *enterprise risk management* (ERM) terhadap kinerja keuangan.

H2 : Terdapat pengaruh *intellectual capital* (IC) terhadap kinerja keuangan.

H3 : Terdapat pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan.

H4 : Terdapat pengaruh *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan.

H5 : Terdapat pengaruh *enterprise risk management* (ERM), *intellectual capital* (IC), *corporate social responsibility* (CSR) dan *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Salah satu komponen dalam penelitian adalah penggunaan metode yang ilmiah. Selanjutnya, agar metode yang ilmiah dapat dilaksanakan dengan relatif mudah dan terarah, dibutuhkan suatu desain yang sesuai dengan metodenya.

Adapun pengertian metode penelitian adalah sebagai berikut:

Menurut Sugiyono (2017:2) adalah:

“Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapat data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan tujuan dan manfaat dalam penelitian, maka diperlukan suatu metode penelitian yang benar-benar sesuai dengan tujuan dan manfaat tersebut. Berdasarkan variabel yang diteliti, maka penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif.

Pendekatan deskriptif menurut Sugiyono (2017: 147) adalah :

“Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Dalam penelitian ini, metode deskriptif akan digunakan untuk menjelaskan, dan menganalisis tentang bagaimana *enterprise risk management, intellectual*

capital, corporate social responsibility, good corporate governance dan kinerja keuangan pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur periode 2014-2018.

Sedangkan pendekatan verifikatif menurut menurut Sugiyono (2017:91):

“Penelitian verifikatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan kualitas antara variabel memlaui suatu pengujian suatu perhitungan statistik didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima.”

Dalam penelitian ini analisis verifikatif digunakan untuk mengetahui pengaruh *enterprise risk management, intellectual capital, corporate social responsibility, good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur periode 2014-2018.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis regresi berganda. Regresi berganda didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono,2015:270).

Metode deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 yaitu (1) Bagaimana *Enterprise Risk Management* pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur, (2) Bagaimana *Intellectual Capital* pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur, (3) Bagaimana *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur, (4) Bagaimana *Good Corporate Governance* pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur, (5) Bagaimana Kinerja Keuangan pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur.

Metode verifikatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 6 dan 7, yaitu : (6) Seberapa besar pengaruh *Enterprise Risk Management, Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance*

Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur Secara Parsial. (7) Seberapa besar pengaruh *Enterprise Risk Management, Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur.

3.1.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono Sugiyono (2017:38) pengertian objek penelitian adalah: “Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

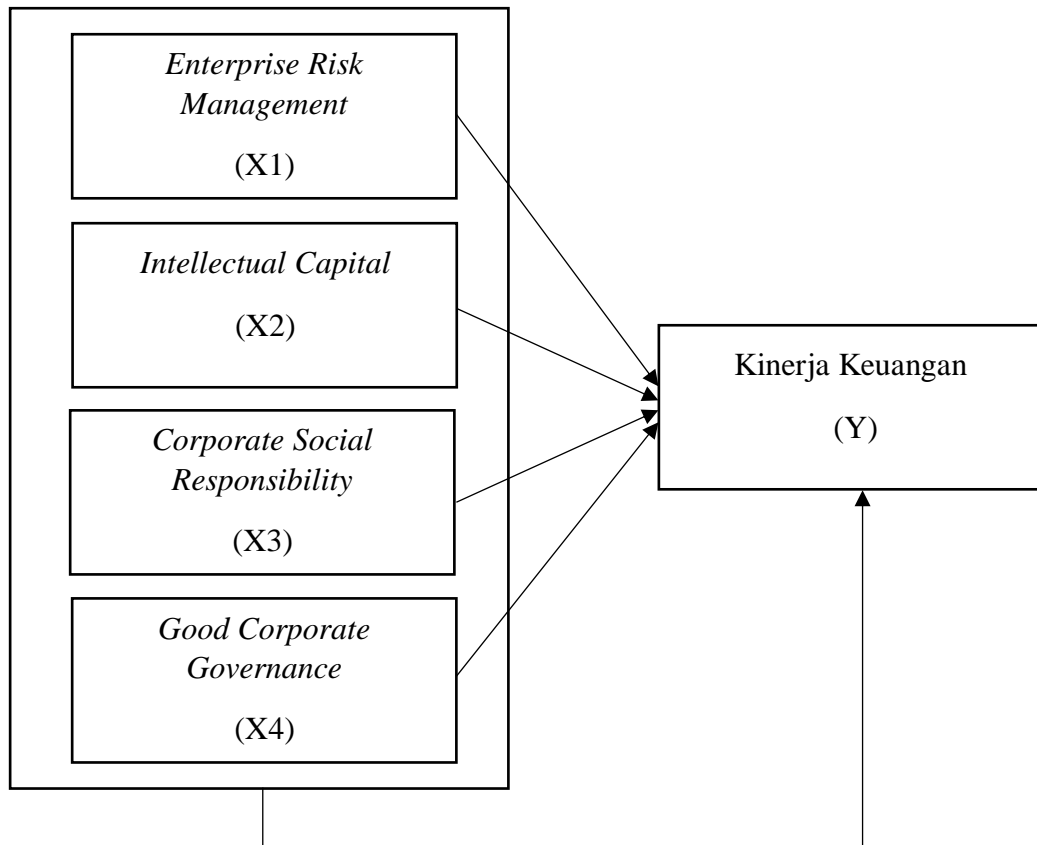
Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian adalah mengenai *enterprise risk management, intellectual capital, corporate social responsibility, good corporate governance* dan kinerja keuangan.

3.1.2 Unit Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian adalah perusahaan BUMN sektor manufaktur periode tahun 2014-2018.

3.1.3 Model Penelitian

Model penelitian merupakan abstraksi fenomena yang diteliti. Sesuai dengan judul skripsi, yaitu *enterprise risk management, intellectual capital, corporate social responsibility, good corporate governance* terhadap kinerja keuangan, maka hubungan antar variabel dapat digambarkan dalam model penelitian sebagai berikut :



Gambar 3.1

Model Penelitian

3.2 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel

3.2.1 Definisi Variabel dan Pengukuran

Menurut Sugiyono Sugiyono (2017:38) adalah :

“Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (*independent variabel*) dan variabel terikat (*dependent variabel*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Menurut Sugiyono Sugiyono (2017:61) yaitu:

“Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Menurut Sugiyono (2017:61) yaitu:

“Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu pengaruh *enterprise risk management, intellectual capital, corporate social responsibility, good corporate governance* terhadap kinerja keuangan, terdapat variabel sebagai berikut:

1. *Enterprise Risk Management*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi menurut COSO (2004):

“*Enterprise Risk Management* adalah sebuah proses yang melibatkan keseluruhan entitas, mulai dari dewan direksi, manajemen, dan pejabat lainnya, yang diaplikasikan ke dalam penyusunan strategi dan melingkupi keseluruhan perusahaan, yang didesain untuk mengidentifikasi kejadian yang berpotensi yang dapat berakibat pada entitas, dan mengelola risiko pada tingkat risiko yang dikehendaki untuk menyediakan penjaminan yang wajar dalam rangka mencapai tujuan dari entitas.”

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur pengungkapan *enterprise risk management* yaitu *ERM framework* yang dikeluarkan oleh COSO, dimana terdapat 108 item pengungkapan *ERM*

yang mencakup delapan dimensi yaitu 1) lingkungan internal; 2) penetapan tujuan; 3) identifikasi kejadian; 4) penilaian risiko; 5) respons atau risiko; 6) kegiatan pengawasan; 7) informasi dan komunikasi; 8) pemantauan. Proksi yang digunakan untuk mengukur pengungkapan *ERM* adalah *indeks ERM disclosure*. *Indeks ERM disclosure* pada laporan tahunan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Sunitha Devi, dkk.,2017:30):

$$ERMDI = \frac{ij \text{ Ditem}}{ij \text{ ADitem}}$$

Keterangan:

ERMDI = *ERM Disclosure Index*

ij Ditem = Total skor item *ERM* yang diungkapkan

ij ADitem = Total item *ERM* yang seharusnya diungkapkan

Skala dikotonomi tidak tertimbang digunakan dalam pemberian skor untuk setiap item pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan. Masing- masing akan diberi skor 1, sehingga jika perusahaan mengungkapkan 1(satu) item saja maka skor yang diperoleh adalah 1 (satu). Namun jika item tidak diungkapkan maka diberi skor 0 (Nol).

2. *Intellectual Capital*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi menurut Moehariono (2012:305) yaitu sebagai berikut:

“Intellectual capital adalah pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh suatu kolektivitas sosial, seperti sebuah

organisasi komunitas intelektual, atau praktik profesional serta *intelectuall capital* mewakili sumber daya yang bernilai tinggi dan berkemampuan untuk bertindak yang didasarkan pada pengetahuan.”

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur pengungkapan *intellectual capital* yaitu berdasarkan indeks *IC disclosure* sesuai dengan dimensi pengungkapan *IC* yang digunakan oleh Singh dan Zahn (2007). Menurut Singh dan Zahn (2007) “Pengungkapan *IC* terdiri dari 81 item yang diklasifikasikan kedalam enam kategori yaitu: 1) karyawan; 2) pelanggan; 3) teknologi informasi; 4) proses; 5) riset dan pengembangan; dan 6) pernyataan strategis.” Pengukuran yang digunakan untuk menganalisis pengungkapan *IC* yaitu dengan rumus berikut (Sunitha Devi,2017:30) :

$$ICDI = \frac{ij \text{ Ditem}}{ij \text{ ADitem}}$$

Keterangan:

$ICDI = IC \text{ disclosue Index}$

$ij \text{ Ditem} = \text{Total skor item } IC \text{ yang diungkapkan}$

$ij \text{ ADitem} = \text{Total item } IC \text{ yang seharusnya diungkapkan}$

Skala dikotonomi tidak tertimbang digunakan dalam pemberian skor untuk setiap item pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan. Masing- masing akan diberi skor 1, sehingga jika perusahaan mengungkapkan 1 (satu) item saja maka skor yang diperoleh adalah 1 (satu). Namun jika item tidak diungkapkan maka diberi skor 0.

3. *Corporate Social Responsibility*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi menurut ISO 26000 dalam Rusdianto (2013: 7) yaitu sebagai berikut:

“Tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang: konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder*; sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional; terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.”

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel *corporate social responsibility* dalam penelitian ini adalah dengan angka indeks *corporate social responsibility disclosure index* (CSRDI) berdasarkan indikator GRI (*Global Reporting Initiatives*)-G4 yang terdiri dari 91 item, yaitu melalui pembagian antara jumlah pendapatan bersih perusahaan dengan jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan. Pendekatan untuk menghitung CSRDI pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu item CSR diberi skor 1 jika diungkapkan dan skor 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Adapun rumus perhitungan *corporate social responsibility* yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*Global Reporting Initiative*). Pengukuran yang digunakan untuk menganalisis pengungkapan CSR dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{CSRDI}_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

Keterangan:

CSRDI = *Corporate Social Responsibility Disclosure Index*

$\sum X_{ij}$ = Total skor item CSR yang diungkapkan

n_j = Total item CSR yang seharusnya diungkapkan, $n_j \leq 91$

4. *Good Corporate Governance*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI)* dalam Muh. Arief Effendi (2016:3) yaitu sebagai berikut:

“*Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan”.

Pengungkapan CG dalam laporan tahunan ini diukur dengan indeks pengungkapan CG perusahaan- perusahaan yang diteliti. Indeks adalah sebuah rasio yang pada umumnya dinyatakan dalam persentase yang mengukur satu variabel pada kurun waktu / lokasi tertentu, relatif terhadap besarnya variabel yang sama pada waktu atau lokasi lainnya. Cara mengukur indeks yang telah dibentuk tersebut adalah dengan mengaplikasikan indeks tidak tertimbang dengan menggunakan nilai dikotomis, yaitu nilai 1 untuk setiap item yang diungkapkan serta 0 untuk item yang tidak diungkapkan (Rini, 2010), sehingga akan didapat skor pengungkapan yang berbentuk angka prosentase. Tabel pengungkapan yang digunakan untuk mengukur indeks pengungkapan CG dikembangkan oleh Kusumawati (2007) yang bersumber dari Keputusan BAPEPAM-LK No.

KEP- 134/BL/2006 dan Pedoman Umum *Good Corporate Governance Indonesia* (KNKG, 2006). Tabel pengungkapan tersebut terdiri dari 16 klasifikasi yang kemudian dibagi lagi menjadi 93 item seperti yang tercantum dalam tabel 2.5 di bab 2.

Indeks pengungkapan CG pada laporan tahunan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Bhuiyan dan Biswan, 2007 dalam Rini, 2010):

$$CGDI/IPCG = \frac{\text{total skor item yang diungkapkan}}{\text{skor maksimum yang seharusnya diungkapkan}}$$

Keterangan:

$CGDI/IPCG = \text{Corporate Governance Disclosure Index/Indeks}$

$\text{Pengungkapan Corporate Governance}$

5. Kinerja Keuangan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi menurut Fahmi (2012:2)

yaitu sebagai berikut :

“Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan- aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.”

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja keuangan pada penelitian ini adalah *Return On Asstes* (ROA) karena ROA dapat menunjukkan menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan

dalam perusahaan. Pengukuran yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100$$

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menjabarkan variable penelitian ke dalam konsep indikator yang bertujuan untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian ini. Berikut adalah operasionalisasi variabel dalam penelitian ini.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
<i>Enterprise Risk Management</i> (X ₁)	“ <i>Enterprise Risk Management</i> adalah sebuah proses yang melibatkan keseluruhan entitas, mulai dari dewan direksi, manajemen, dan pejabat lainnya, yang diaplikasikan ke dalam penyusunan strategi dan melingkupi keseluruhan perusahaan, yang didesain untuk mengidentifikasi kejadian yang berpotensi yang dapat berakibat pada entitas, dan mengelola risiko pada tingkat risiko	$ERMDI = \frac{ij \text{ Ditem}}{ij \text{ ADitem}}$ (Sunitha Devi, dkk.,2017:30)	Rasio

	<p>yang dikehendaki untuk menyediakan penjaminan yang wajar dalam rangka mencapai tujuan dari entitas.”</p> <p><i>COSO</i> (2004)</p>		
<p><i>Intellectual Capital</i> (X₂)</p>	<p><i>Intellectual capital</i> adalah pengetahuan (<i>knowledge</i>) dan kemampuan (<i>ability</i>) yang dimiliki oleh suatu kolektivitas sosial, seperti sebuah organisasi komunitas intelektual, atau praktik profesional serta <i>intellectuall capital</i> mewakili sumber daya yang bernilai tinggi dan berkemampuan untuk bertindak yang didasarkan pada pengetahuan.</p> <p>Moeheriono (2012:305)</p>	$ICDI = \frac{ij \text{ Ditem}}{ij \text{ ADitem}}$ <p>(Sunitha Devi, dkk.,2017:30)</p>	Rasio
<p><i>Corporate Social Responsibility</i> (X₃)</p>	<p>Tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang: konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; memperhatikan kepentingan dari para <i>stakeholder</i>; sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional; terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi</p>	$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j} \times 100\%$ <p>Sumber: <i>Global Reporting Initiative</i> (GRI)</p>	Rasio

	<p>baik kegiatan, produk maupun jasa.</p> <p>ISO 26000 dalam Rusdianto (2013: 7)</p>		
<i>Good Corporate Governance (X₄)</i>	<p><i>Corporate Governance</i> adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.</p> <p><i>Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI)</i> dalam Muh. Arief Effendi (2016:3)</p>	$\text{CGDI/IPCG} = \frac{\text{total skor item yang diungkapkan}}{\text{skor maksimum yang seharusnya diungkapkan}}$ <p>(Bhuiyan dan Biswan, 2007 dalam Rini, 2010)</p>	Rasio
Kinerja Keuangan (Y)	<p>Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis</p>	$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$ <p>Fahmi (2012:137)</p>	Rasio

	<p>dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.</p> <p>Fahmi (2012:2)</p>		
--	---	--	--

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi Penelitian

Sugiyono (2017:80) mendefinisikan populasi sebagai berikut:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Sesuai dengan definisi diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN sektor manufaktur tahun 2014-2018. Tidak semua populasi ini akan menjadi objek penelitian, sehingga perlu dilakukan sampel lebih lanjut.

Berikut adalah Perusahaan BUMN sektor manufaktur periode 2014-2018 yang dijadikan populasi dengan jumlah 31 perusahaan, yaitu :

Tabel 3.2
Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur Periode 2014-2018
yang dijadikan populasi

No	Nama Perusahaan	Bidang
1	PT Balai Pustaka (Persero)	Media
2	PT Barata Indonesia (Persero)	Logam
3	PT Batan Teknologi (Persero)	Atom
4	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Gula
5	PT Bio Farma (Persero)	Farmasi
6	PT Cambrics Primiissima (Persero)	Garment
7	PT Dahana (Persero)	Senjata
8	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Kapal
9	PT Garam (Persero)	Garam
10	PT Industri Gelas (Persero)	Gelas
11	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Kapal
12	PT Indofarma (Persero) Tbk.	Farmasi
13	PT Industri Kereta Api (Persero)	Kereta Api
14	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Elektronika
15	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Garment
16	PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	Farmasi
17	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Kertas
18	PT Kertas Leces (Persero)	Kertas
19	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Kapal
20	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	Logam
21	PT LEN Industri (Persero)	Elektronika
22	PT PAL Indonesia (Persero)	Kapal
23	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Media
24	PT Pindad (Persero)	Senjata

25	PT Pradnya Paramita (Persero)	Media
26	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Media
27	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Pesawat Terbang
28	PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)	Pupuk
29	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.	Semen
30	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Semen
31	PT Semen Kupang (Persero)	Semen

Sumber: bumh.go.id

3.3.2 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2017:81) teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan dipergunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling* (Sugiyono, 2017:82).

“*Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi *sampling sistematis*, *sampling kouta*, *sampling insidental*, *porposive sampling*, *sampling jenuh*, dan *snawball sampling*.” Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling*, lebih tepatnya teknik *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (2017:120) *porposive sampling* adalah:

“Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.”

Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu penulis memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan BUMN sektor manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut dari tahun 2014-2018.
2. Data yang diambil merupakan data laporan tahunan perusahaan BUMN sektor manufaktur yang memuat informasi yang berkaitan dengan *enterprise risk management, intellectual capital, corporate social responsibility dan good corporate governance*.

Tabel 3.3
Hasil *Purposive Sampling* berdasarkan kriteria pada Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur periode 2014-2018

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
	Populasi	31
1	Dikurangi : Perusahaan BUMN sektor manufaktur yang tidak menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut dari tahun 2014-2018	(15)
2	Dikurangi : perusahaan BUMN sektor manufaktur yang tidak memuat informasi yang berkaitan dengan <i>enterprise risk management, intellectual capital, corporate social responsibility dan good corporate governance</i> secara lengkap.	(6)
	Jumlah perusahaan yang dapat menjadi sampel yang terseleksi sesuai kriteria:	10

3.3.3 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:81) sampel adalah sebagai berikut:

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang diambil oleh populasi tersebut”.

Pengukuran sampel merupakan langkah-langkah untuk menentukan besarnya sampel yang akan diambil dalam melaksanakan suatu penelitian. Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa sampel yang dipilih harus representif, artinya segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dipilih.

Berikut adalah perusahaan BUMN Sektor Manufaktur periode 2014-2018 yang dijadikan sampel dengan jumlah 10 perusahaan, yaitu:

Tabel 3.4
Perusahaan BUMN Sektor Manufaktur Periode 2014-2018
yang dijadikan sampel

NO	Nama Perusahaan
1	PT Bio Farma (Persero)
2	PT Dahana (Persero)
3	PT Indofarma (Persero) Tbk.
4	PT Industri Kereta Api (Persero)
5	PT Kimia Farma (Persero) Tbk.
6	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
7	PT LEN Industri (Persero)
8	PT Pindad (Persero)
9	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
10	PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)

Sumber: bumn.go.id

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan, dll. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder.

Menurut Sugiyono (2017:193) sumber primer dan sumber sekunder adalah:

“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber data sekunder, dimana laporan tahunan diperoleh melalui website resmi BUMN, yaitu bumn.go.id.

3.5 Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.5.1 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:147) analisis data adalah sebagai berikut:

“Kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.”

3.5.1.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:206) analisis deskriptif adalah:

“Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Sedangkan menurut Iman Ghozali (2011:19), analisis deskriptif merupakan:

“Gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan kemencengan distribusi (*skewness*).”

Dalam analisis ini dilakukan pembahasan mengenai *enterprise risk management*, *intellectual capital*, *corporate social responsibility*, *good corporate governance* dan kinerja keuangan. Penelitian menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, minimum, dan maksimum. Umumnya statistik deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi ini adalah perusahaan BUMN sektor manufaktur periode 2014-2018.

Tahapan yang dilakukan untuk menganalisis *enterprise risk management*, *intellectual capital*, *corporate social responsibility*, *good corporate governance* dan kinerja keuangan dalam penelitian ini, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Enterprise Risk Management*

- a. Menghitung item yang diungkapkan sesuai dengan dimensi pengungkapan yang dikemukakan COSO dalam Sunitha Devi, dkk.,2017:30.
- b. Membagi item yang diungkapkan dengan item yang seharusnya diungkapkan.
- c. Menghitung mean, standar deviasi, maksimum dan minimum.
- d. Melakukan analisis nilai maksimum dan minimum.
- e. Membuat kesimpulan

2. *Intellectual Capital*

- a. Menghitung item yang diungkapkan sesuai dengan dimensi pengungkapan yang dikemukakan Singh dan Zahn (2007).
- b. Membagi item yang diungkapkan dengan item yang seharusnya diungkapkan.
- c. Menghitung mean, standar deviasi, maksimum dan minimum.
- d. Melakukan analisis nilai maksimum dan minimum.
- e. Membuat kesimpulan.

3. *Corporate Social Responsibility*

- a. Memberi *score* 1 jika diungkapkan dan *score* 0 jika tidak diungkapkan, menggunakan metode *content analyze* berdasarkan indikator GRI (*global reporting initiatives*) yang terdiri dari 91 item.
- b. Menghitung nilai rata-rata, maximum, minimum dan standar deviasi.

- c. Melakukan analisis nilai maksimum dan minimum.
- d. Membuat kesimpulan.

4. *Good Corporate Governance*

- a. Memberi *score* 1 jika diungkapkan dan *score* 0 jika tidak diungkapkan.
- b. Membagi item yang diungkapkan dengan item yang seharusnya diungkapkan
- c. Menghitung nilai rata-rata, maximum, minimum dan standar deviasi.
- d. Melakukan analisis nilai maksimum dan minimum.
- e. Membuat kesimpulan.

5. **Kinerja Keuangan**

- a. Menentukan laba setelah pajak dan total aktiva pada perusahaan bank.
- b. Membagi nilai laba setelah pajak dan total aktiva pada perusahaan bank.
- c. Menentukan kriteria nilai kinerja keuangan perusahaan bank.
- d. Menarik kesimpulan.

Tabel 3.5

Kriteria Variabel Kinerja Keuangan

Interval	Kategori
< 0,00	Sangat Rendah
0,01-33,3	Rendah
33,4-66,6	Sedang
66,7-100,00	Tinggi
>100,01	Sangat Tinggi

Sumber: Kasmir (2008:202)

3.5.1.2 Analisis Verifikatif

Menurut Sugiyono (2017:20) yaitu:

“Penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Dalam penelitian ini analisis verifikatif digunakan untuk mengetahui hasil penelitian yang berkaitan dengan *enterprise risk management, intellectual capital, corporate social responsibility* dan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Metode analisis ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Ada beberapa pengujian yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menguji apakah model yang dipergunakan tersebut mewakili atau mendekati kenyataan yang ada. Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik dimana terdapat empat jenis pengujian pada uji asumsi klasik ini, diantaranya:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terkait untuk setiap nilai variable bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai eror (ϵ) yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistic. Menurut Singgih Santoso (2012:393) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan pada probabilitas (Asymptotic Significance), yaitu:

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dan model regresi adalah normal
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dan model regresi adalah tidak normal

Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode gambar normal *Probability Plots* dalam program SPSS. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Singgih Santoso, 2012:241). Kriteria Uji: Model regresi tidak memiliki masalah autokorelasi jika nilai d_w yang diperoleh berada diantara 1 dan 3 (Sarwono, 2012:28). Pada prosedur pendeteksian masalah autokorelasi dapat digunakan besaran Durbin-Watson. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dari data residual terlebih dahulu dihitung nilai statistik Durbin-Watson (D-W):

$$D = \frac{\sum(e_t - e_{t-1})}{\sum^2 e_t}$$

c. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Jika variable independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variable orthogonal adalah variable independen yang nilai korelasi antar sesama variable independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan ukuran setiap variable independen manakala yang dijelaskan oleh variable independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas independen yang dipilih yang tidak dijelaskan oleh variable independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF=1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya mutikolonieritas adalah nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah multikolonieritas atau adanya hubungan korelasi diantara variabel-variabel independennya (Ghozali, 2013:105).

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar) (Ghozali, 2013:139).

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variable terkait (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized*.

Dasar dasar analisis:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi

a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2015:270):

“Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variable dependen”.

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah:

$$Y' = a + bX$$

Dimana :

Y' = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)

B = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variable dependen yang didasarkan pada variable independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

X = Subyek pada variable independen yang mempunyai nilai tertentu.

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor

dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2014:277).

Penelitian ini, penulis menggunakan persamaan regresi linier berganda karena variabel bebas dalam penelitian lebih dari satu. Adapun persamaan regresi linier berganda menurut Sugiyono (2014:277) dapat dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Y = Kinerja Keuangan

α = Konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 = Koefisien regresi variabel independen

X_1 = *enterprise risk management*

X_2 = *intellectual capital*

X_3 = *corporate social responsibility*

X_4 = *good corporate governance*

e = Standar error/variabel pengganggu lain yang mempengaruhi Y

Dalam penelitian ini, variabel terikat (*dependent variable*) adalah kinerja keuangan dan variabel bebas (*independent variable*) yaitu *enterprise risk management*, *intellectual capital*, *corporate social responsibility*, *good corporate governance* Sehingga model regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KK = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

KK	= Kinerja Keuangan
X ₁	= <i>enterprise risk management</i>
X ₂	= <i>intellectual capital</i>
X ₃	= <i>corporate social responsibility</i>
X ₄	= <i>good corporate governance</i>
b ₀	= Konstanta
b ₁ , b ₂ , b ₃ , b ₄	= Koefisien
e	= Pengaruh faktor lain

3. Analisis Korelasi

Analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui kekuatan atau hubungan antara korelasi kedua variabel dan ukuran yang dipakai untuk menentukan derajat atau kekuatan korelasi tersebut. Jenis korelasi hanya bisa digunakan pada hubungan variabel garis lurus (linier) adalah korelasi *Pearson Product Moment* (r).

Menurut Sugiyono (2016:228):

“Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau ratio, dan sumber data dari kedua variabel atau lebih tersebut adalah sama.” Arahnya dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negative, sdangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien kolerasi untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Rumus kolerasi *Pearson Product Moment* (r) adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

(Sumber: Sugiyono (2017:183))

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien kolerasi

X = variabel independen

Y = Variabel dependen

n = Banyaknya sampel

Dari hasil yang diperoleh dengan rumus diatas, dapat diketahui tingkat pengaruh variabel X dan Y. Pada hakikatnya nilai r dapat bervariasi dari -1 hingga +1, atau secara matematis dapat ditulis menjadi $(-1 \leq r \leq +1)$. Hasil dari perhitungan akan memberikan tiga alternatif, yaitu:

- Apabila nilai $r = -1$ artinya kolerasi negatif sempurna.
- Apabila $r = 0$ artinya tidak ada kolerasi
- Apabila $r = 1$ berarti kolerasi sangat kuat.

Artinya harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r pada tabel

3.6.

Tabel 3.6**Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Kolerasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2017:231)

3.5.2 Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut dan dituntut untuk melakukan pengecekannya.

Sugiyono (2015:93) mendefinisikan Hipotesis yaitu sebagai berikut:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan. Belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel yang diteliti. Tahap-tahap dalam rancangan pengujian hipotesis ini dimulai dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_a), pemilihan tes statistik, perhitungan nilai statistic dan penetapan tingkat signifikan.

1. Penetapan Hipotesis

- $H_01 : (\beta_1 = 0)$ = *Enterprise Risk Management* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
- $H_{a1} : (\beta_1 \neq 0)$ = *Enterprise Risk Management* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
- $H_02 : (\beta_2 = 0)$ = *Intellectual Capital* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
- $H_{a2} : (\beta_2 \neq 0)$ = *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
- $H_03 : (\beta_3 = 0)$ = *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
- $H_{a3} : (\beta_3 \neq 0)$ = *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
- $H_04 : (\beta_4 = 0)$ = *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
- $H_{a4} : (\beta_4 \neq 0)$ = *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

2. Uji Signifikan

Sebelum pengujian dilakukan maka terlebih dahulu harus ditentukan taraf signifikasinya. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu rencana penelitian agar diketahui batas-batas untuk menentukan pilihan antara hipotesis nol (H_0) dengan hipotesis alternative (H_a). Tingkat signifikan yang dipilih dalam penelitian ini

adalah 0,05 (5%) dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Angka ini dipilih karena cukup mewakili peranan antara kedua variabel dan merupakan suatu tingkat signifikan yang umum digunakan dalam penelitian di bidang ilmu sosial.

3. Uji (t-test)

Uji (t-test) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:178). Untuk pengujian (t-test) digunakan dengan rumus hipotesis sebagai berikut:

Uji signifikan terhadap hipotesis yang telah ditentukan dengan menggunakan uji t. Menurut Sugiyono (2015:250) rumus uji t adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

t = Nilai uji

r = Koefisien korelasi

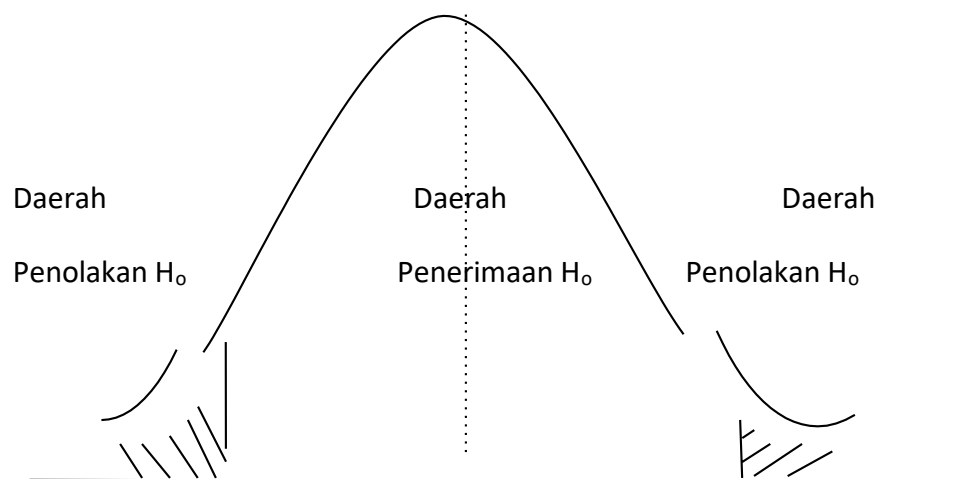
r² = Koefisien determinasi

n = Jumlah sampel

Kriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis nol (H₀) yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Ho diterima apabila t_{hitung} berada di daerah penerimaan Ho, dimana
 $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $sig > \alpha$
- Ho ditolak apabila berada di daerah penolakan Ho, dimana
 $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $sig < \alpha$

Apabila Ho diterima, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya apabila Ho ditolak, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

4. Uji (F- Test)

Uji pengaruh simultan (F test) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013:177). Menurut Sugiyono (2014:257) uji pengaruh simultan (F test) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$

Dimana:

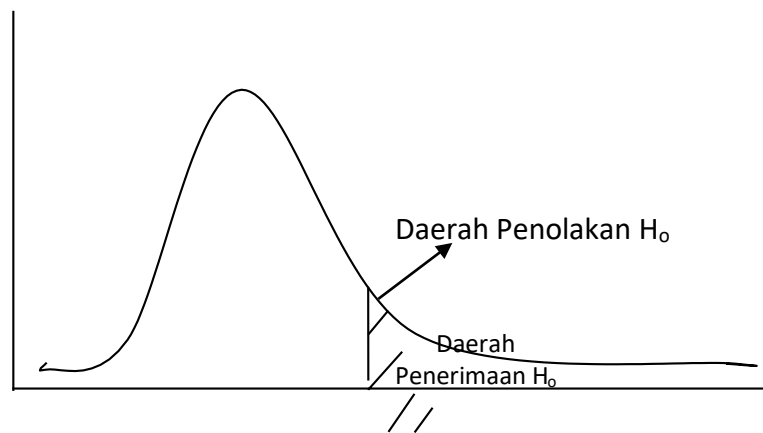
- R = Koefisien Kolerasi Ganda
 K = Jumlah Variabel Independen
 N = Jumlah Anggota Sampel
 Dk = (n-k-1) Derajat Kebebasan

Setelah mendapatkan nilai F_{hitung} ini, kemudian dibandingkan dengan nilai F_{tabel} dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 atau 5% artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau kolerasi kesalahan sebesar 5% dan derajat kebebasan digunakan untuk menentukan F_{tabel} .

Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

- H_0 diterima apabila : $F_{hitung} < F_{tabel}$
- H_0 ditolak apabila : $F_{hitung} > F_{tabel}$

Apabila H_0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dinyatakan tidak signifikan, dan sebaliknya apabila H_0 ditolak menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dinyatakan signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.3

Daerah Penolakan Hipotesis

Kemudian akan diketahui apakah hipotesis dalam penelitian ini secara simultan ditolak atau tidak, adapun hipotesis secara simultan adalah sebagai berikut:

$H_0 : r = 0$: *enterprise risk management, intellectual capital, corporate social responsibility* dan *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

$H_0 : (r \neq 0)$: *enterprise risk management, intellectual capital, corporate social responsibility* dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel yang digunakan. Koefisien determinasi menjelaskan proporsi variasi dalam variabel dependen (Y) yang dijelaskan oleh hanya satu variabel independen (lebih dari satu variabel bebas

: X_i : $i = 1,2,3,4$, dst) secara bersama-sama.

Sementara itu R adalah koefisien kolerasi majemuk yang mengukur tingkat hubungan antara variabel dependen (Y) dengan semua variabel independen yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif. Selanjutnya untuk melakukan proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen.

Menurut Sugiyono (2012:231) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Kd = r^2_{xy} \times 100\%$$

Dimana:

Kd = Koefisien determinasi

r^2_{xy} = Koefisien Kuadrat Kolerasi agenda

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- Jika Kd mendekati (0), berarti pengaruh variabel dependen terhadap independen lemah
- Jika Kd mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independen terhadap dependen kuat.

6. Koefisien Derteminasi Parsial

Koefisien derteminasi parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase pengaruh secara parsial per sub variabel *enterprise risk*

management (X1), *intellectual capital* (X2), *corporate social responsibility* (X3) dan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan (Y), maka dapat diketahui dengan cara mengkalikan nilai *standardized coefficients* beta dengan *correlations (zero order)*, yang mengacu pada hasil perhitungan dengan menggunakan *software SPSS for windows*. Rumus koefisien determinasi yang dikemukakan oleh Gujarati (2006:172) adalah sebagai berikut :

$$KD = \beta \times \text{zero order} \times 100\%$$

Keterangan :

B : Beta (nilai *standardized coefficients*)

Zero order : Matriks korelasi variabel bebas dengan variabel terikat.

Dimana apabila :

KD 0 : Berarti pengaruh variabel X terhadap variabel Y, lemah

KD 1 : Berarti pengaruh variabel X terhadap variabel Y, kuat

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku:

- Adrian Sutedi. (2011) *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*. (2017). *COSO ERM Integrated Framework : Aligning Risk with Strategy and Performance*. Public Exposure Juni 2017.
- Crowther David. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Guler Aras & Ventus Publishing ApS
- Darmawi, Herman. 2014. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara
- Fahmi, Irham. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Forum for Corporate Governance in Indonesia*. 2001. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prentice Hall.
- Ghozali Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivaries dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regesi*. Edisi 7. ISBM: 2088: 0685 Sumatra Universitas Syiah Kuala.
- Hadi, Nur. (2014). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hanafi, Dr. Mamduh M., Prof. Dr. Abdul Halim. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Edisi ke-5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harahap, Sofyan Syafrri 2010 .*Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Cet 11. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Harmono. 2011. *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis*, Edisi kesatu. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hery. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: CAPS
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Tahun 2012
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Moehariono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muh, Arief. Effendi. 2009. *The Power Of Corporate Governance. Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Munawir, S. 2012. Analisis Informasi Keuangan, Liberty, Yogyakarta.
- PSAK No. 19 tahun 2012 tentang aktiva tidak berwujud
- Riyanto, Bambang. 2010. Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan, edisi ke 4. Yogyakarta:BPPE.
- Rusdianto, Ujang. (2013). CSR Communication a Framework for PR Practitioners. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. (2012). Good Governace. "Kepemerintahan Yang Baik & Good Corporate Governance. "Tata kelola Perusahaan Yang Baik". Bandung: Mandar Maju.
- Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) Nomor 1*
- Stewart, Thomas A. 2010. Intellectual Capital. London: Nicholas Brealey Publishing
- Sugiyono. 2017. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabert.
- Sukmadi. (2010). Pengantar Ekonomi Bisnis. Bandung: Humaniora
- Sukrisno Agoes. 2013. Etika Bisnis Dan Profesi. Jakarta : Salemba Empat.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/24/DPNP (2011)
- Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor kep-117/M-MBU/2022 pasal 11 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Suryana. 2011. Kewirausahaan. Jakarta: Salemba Empat
- Tunggal, Hadi Setia. (2013). Internal Audit & Corporate Governance. Jakarta: Hervarindo
- Tunggal,Amin Widjaja. (2013). Pengendalian Internal Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan. Jakarta: Raja Grafindo, Cetakan I
- Ulum, Ihyaul. 2009. Intellectual Capital. Yogyakarta: Graha Ilmu

Literatur Jurnal:

- Agustinus Soetrisno Lina. 2014. *The Influence of Intellectual Capital Components Towards the Company Performance.*

- Ahmed, Sarwan Uddin, Md. Zahidul Islam dan Ikramul Hasan. 2012. Corporate Social Responsibility and Financial Performance Linkage-evidence from the Banking Sector of Bangladesh. HATAM publisher : Journal of Organizational Management 1(1), 14-21.
- Amelia Nur Safitri. 2012. Pengaruh Pengungkapan Intellectual Capital dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan High Profit yang Terdaftar di BEI). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Bangkit Prayoga, Edo dan Luciana S. A. 2013. “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 4, No. 1, Maret 2013: 1-19
- Budimanta, arif dan Bambang Rudito, Adi Prasetyo (2004). Corporate Social Responsibility: Jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini. Jakarta: ICSD.
- Dahlia, Lely, dan Sylvia Veronica Siregar. 2008. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2005 dan 2006). Pontianak : Simposium Nasional Akuntansi XI.
- Florio, C., dan Leoni, G.(2017). Enterprise Risk Management and Firm Performance : The Italian Case. *The British Accounting Review*, 49(1), 56-74.
- Ihyaul Ulum, 2017. Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi. Edisi ke-3. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. 65144.
- Jafari M, et al. 2011. Effective Risk Management and Company's Performance: Investment in Innovations and Intellectual Capital Using Behavioral and Practical Approach. International Research Journal of Finance and Economics. ISSN 1450-2887 Issue 80.
- Klaudia Julindra dan Liana Susanto. 2015. “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Leverage, Profitabilitas, dan Umur Listing Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2012-2014.” Jurnal Ekonomi. Volume XX, No. 01, Maret 2015:103-119
- Maryam Mangantar. 2019. *The Influence of Corporate Social Responsibility and Corporate Governance on Banking Financial Performance*.
- Meizaroh dan Lucyanda, jurica. 2012. Pengaruh Corporate Governance, kinerja Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Modal Intelektual. Media Riset Akuntansi. Volume 2, No. 1 Februari 2012. Hal: 65-81. ISSN 2088-2106

- Mohamad A'ar Pranatha, Moeljadi dan Erna Hernawati. 2018. Penerapan Enterprise Risk Management dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 5, No.1, 2018, 17-39.
- Muliani, Eni. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance sebagai variable Moderating. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha.
- Nachailit, I et al. 2011. Effects of accounting information reporting on risk management capability of Thai export manufacturing firms. Journal of International Business and Economics. Publisher: International Academy of Business and Economics Audience: Academic
- Oka Aditya, dan Prima Naomi. 2017. Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dan Nilai Perusahaan di Sektor Kontruksi dan Properti. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Volume 7, No.2: 167-180. P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN: 2461-1182
- Oktavianti, Heni dan Wahidahwati. 2014. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Intellectual Capital". Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol.3 No. 5 2014
- Rini Lestari (2013). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Organisasi. (Studi pada Dana Pensiun Pemberi Kerja di wilayah Jabar-Banten). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol 13 No. 2
- Salsabila, S., dan Muhammad, S. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 50, No. 3, 108-117.
- Sripeni, Rusbiyanti. 2014. "Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Perusahaan". Jurnal Ekomaks. Vol 3 No 2.
- Sucipto, 2013, "Penilaian Kinerja Keuangan", Jurnal Ekonomi & Bisnis, FE Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sunitha Devi, I Gusti Nyoman Budiasih dan I Dewa Nyoman Bandera. 2017. Pengaruh Pengungkapan *Enterprise Risk Management* dan Pengungkapan *Intellectual Capital* Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 14, No.1: 20-45
- Taswan. 2010. Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi. Edisi Kedua. Yogyakarta :UPP STIM YKPN
- Tri Purwani. (2010). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal.Fakultas Ilmu Komputer Universitas AKI.
- Ulum, I. 2009. Intellectual Capital; Konsep dan Kajian Empiris. PT. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Usman Risalatul Mungawanah. 2018. Pengaruh *Enterprise Risk Management* Terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Wahyuni Agustina, Gede Adi Yuniarta dan Ni Kadek Sinarwati. 2015. *Pengaruh Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3, No. 1.

Widiyaningrum, Ambar. 2004. Modal Intelektual. Departemen Akuntansi FEUI Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 1 pp.16-25.

Zuhroh, Diana dan I Putu Pande Heri Sukmawati. 2003. Analisis Pengaruh Luas Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan terhadap Reaksi Investor. Surabaya : Simposium Nasional Akuntansi VI

Literatur Peraturan & Undang-undang:

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Literatur Internet:

<http://www.bumn.go.id/>

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190409130244-17-65433/7-tahun-merugi-krakatau-steel-merana-karena-utang>

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190812112315-17-91292/kinerja-susut-saham-indofarma-anjlok-hingga-60-lebih>

<https://www.matamatapolitik.com/tujuh-bumn-yang-merugi-sepanjang-2019-listicle/>

www.iicg.org